**EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING*
*STANDARDS (IFRS)***

Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Crecentia Yudhita Wijayanti

NIM : 082114077

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING*

STANDARDS (IFRS)

Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia,tbk

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Crecentia Yudhita Wijayanti

NIM : 08 2114 077

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

Skripsi

**EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS (IFRS)***

Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia,tbk

Oleh:

Crecentia Yudhita Wijayanti

NIM : 08 2114 077

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I

Drs. Yusef W. Karsana, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 4 September 2012

Skripsi

EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)*

Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia,tbk

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Crecentia Yudhita Wijayanti
NIM : 08 2114 077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 September 2012
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si, QIA

Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA

Anggota Drs. Yusef W. Karsana, M.Si., Akt., QIA

Anggota Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si, QIA

Anggota A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA

Yogyakarta, 28 September 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dr. H. Herry Maridjo, M.Si

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fortite In Re, Suaviter in Modo –Fr. Benny-

Dream, Believe, Make it happen !!! – Agnes Monica –

Tuhan selalu punya rencana yang indah dengan cara- Nya ☺ -Anonym-

Kupersembahkan untuk:

For My beloved Jesus Christ, thank you for Your blessing

For My Dad and Mom..

For My Lovely GrandFa

My Alm. Grand Ma and Dhe'Wied

My Sista 'n Bro' Mb Desi, Dian & Daiva

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)* (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 19 September 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 September 2012

Yang membuat pernyataan

Crecentia Yudhita Wijayanti

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma:

Nama : Crecentia Yudhita Wijayanti

Nomor Mahasiswa : 082114077

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul "**EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)* (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya hak untuk menyimpan, mengalih dalam bentuk media lain, mengelola dalam pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin dari saya maupun memberikan loyalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 30 September 2012

Yang Menyatakan:

Crecentia Yudhita Wijayanti

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menulis skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis
2. Drs. Yusef Widya Karsana Ak, QIA selaku pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. PT Telekomunikasi Indonesia,tbk yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
4. Divisi gugus tugas IFRS, Bapak Agus Hery Prasetya atas bimbingan dan bantuannya, Teh Gista, Pak Alam, bang Fery serta semua rekan kerja atas bimbingan, bantuan dan keramahan yang diberikan selama saya melakukan penelitian.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Ayah, Ibu, Mbah Kakung, mba desi, dhek dian dan daiva atas doa, kesabaran, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat – sahabatku tercinta Tikah, Vony, Dayana, Aga, Dian, Yohana, Rina, Ruth, Pauline, Anggi atas doa, semangat dan bantuan yang selalu diberikan. Kegagalan bukan merupakan halangan. Tetap semangat kawan!
8. Kakak – kakakku yang selalu mendukung dan mendengar keluh kesahku mbak Dina, Mbak dyas dan Mbak Osha.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Rekan seperjuangan kelas bimbingan Pak Yosef, Sari, Dayana, Aga, Vera, Roni, Mbak BK, Rikvan, Coco, dan Dian.
10. Teman – teman akuntansi angkatan '08, khususnya kelas B. Saling mendoakan dan menyemangati. Sukses teman – teman.
11. Teman – teman kost dahlia dari tahun 2008 sampai 2012. Aku belajar banyak hal dari kalian. Terima kasih atas segalanya.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama proses penulisan ini.

Yogyakarta, September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. IFRS : Harmonisasi Standar	8
B. Implementasi IFRS.....	9
C. Dampak Adopsi IFRS	10
D. PSAK Berlaku Efektif di Indonesia	12
E. IFRS 1: <i>First Adoption</i>	17
F. PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi	21
G. Sewa Guna Usaha	23
H. Pendapatan	24
I. Imbalan Karyawan	26
J. Nilai Tukar Mata Uang Asing.....	28
K. Biaya Pinjaman	29
L. Investasi pada Entitas Asosiasi	30
M. Aset Tak Berwujud	31

	Halaman
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Subyek dan Obyek Penelitian	35
D. Data yang Diperlukan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	38
A. Sejarah Perusahaan	38
B. Visi dan Misi Perusahaan	40
C. Lokasi Perusahaan.....	40
D. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan	40
E. Struktur Organisasi Perusahaan	44
F. Anak Perusahaan	45
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaruh Adopsi IFRS bagi Perusahaan	50
B. Kendala Penerapan IFRS	53
C. Kesesuaian IFRS dengan PSAK	56
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Keterbatasan Penelitian	86
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Berlaku 1 Januari 2012	13
Tabel 4.1. Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung (lebih dari 50%)	46
Tabel 4.2. Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung (antara 20%-50%)	47
Tabel 4.3. Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung (kurang dari 20%)	48
Tabel 4.4. Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung	49
Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS berdasarkan laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia,tbk tahun 2011	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia	10
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan	44
Gambar 4.2. Anak Perusahaan Telkom	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	90
Lampiran 2 Hasil Wawancara	91

ABSTRAK

**EVALUASI PENERAPAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)*
Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

**Crecentia Yudhita Wijayanti
NIM: 082114077
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penerapan IFRS, kendala yang dihadapi pada saat penerapan IFRS dan perbedaan antara laporan keuangan versi IFRS dengan laporan keuangan versi PSAK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan riset kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara: 1) melakukan wawancara dan menganalisis pengaruh penerapan IFRS bagi Telkom. 2) Membandingkan laporan keuangan versi IFRS dengan PSAK. 3) Menganalisis sebab perbedaan. 4) Menganalisis apakah perbedaan berpengaruh material terhadap perusahaan.

Hasil analisis data dan pembahasan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh adopsi IFRS bagi perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah Telkom menjadi *leader* dalam implementasi IFRS, perusahaan memiliki sumber daya manusia yang lebih *valuable*, investor dan *stakeholder* lebih percaya pada laporan keuangan Telkom, kinerja perusahaan dinilai lebih baik, dan sistem informasi dan teknologi perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan IFRS. 2) Kendala yang dihadapi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam mengadopsi IFRS adalah *knowledge*, risiko yang besar, dan sistem IT yang kurang mendukung. 3) Perbedaan yang material antara laporan keuangan IFRS dengan laporan keuangan PSAK disebabkan oleh empat hal, yakni: pencatatan perjanjian konsesi jasa, pencatatan imbalan karyawan, penyesuaian terhadap transaksi kumulatif, dan pencatatan atas hak atas tanah.

ABSTRACT

**EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
A Case Study at PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

Crecentia Yudhita Wijayanti

NIM: 082114077

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2012

This study aimed to evaluate the effect of the implementation of IFRS, together with problems encountered during the implementation of IFRS and the differences between versions of IFRS financial statement and the financial statements of PSAK version of PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

This type of research is a case study. The data were obtained by conducting interviews, observation, documentation and library research. Data analysis techniques used was descriptive analysis by: 1) conducting interviews and analyzing the influence of the implementation of IFRS for Telkom, 2) Comparing financial statements versions of IFRS with PSAK, 3) Analyze cause differences, and 4) Analyze whether the differences is material.

The results of the data analysis and discussion showing that: 1) the effect of the adoption of IFRS for companies PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk are: Telkom becomes the leader in the implementation of IFRS in Indonesia, the company then possesses a more valuable human resources, the investors and stakeholders than rely on Telkom's financial statements more, performance of the companies considered better, and it's information systems and technology are developed in accordance with IFRS requirements. 2) Constraints faced by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk are the lack of knowledge on IFRS, a huge risk on the implementation, and less supporting IT systems. 3) material differences between IFRS financial statements and PSAK financial statements caused by four things: the acquisition of the concession agreement registration services, the recording of the employee benefits, the cumulative adjustment to the transaction, and the acquisition of the land rights. This difference can be caused by any of these conditions, the first one is that IFRS standards are differ from PSAK, and the second is that in some cases the PSAK standards are unclear enough, and the third one is the presence of the double standards followed by the company relevant to the presentation in Indonesia Stock Market (to meet the PSAK standards) and the aboard Stock Market (to meet IFRS standards).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya era baru yang disebut era globalisasi, menyebabkan semakin tipisnya garis batas antar negara. Selain mempengaruhi sektor publik, globalisasi juga mempengaruhi sektor ekonomi, terutama pada sektor keuangan. Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenangan dan tanggungjawab tiap negara akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi suatu negara (Arja Sadjiarto, 1999).

Para investor menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membantu mengambil keputusan yang berhubungan dengan sekuritas. Adanya investor dari luar negeri, membuat perusahaan harus menyajikan laporan keuangan dalam skala global. Namun, yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan standar dan tata cara pelaporan keuangan dari setiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar pelaporan internasional yang mampu menyetarakan laporan keuangan multi nasional.

International Financial Report Standard (IFRS) merupakan hasil harmonisasi standar keuangan internasional yang menjadi jawaban atas

persoalan kebutuhan standar internasional. Konvergensi IFRS bukanlah persoalan yang mudah. Adanya berbagai aspek perbedaan dari berbagai negara menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap negara untuk mengadopsinya. Namun demikian, IFRS sudah mulai diterapkan di banyak negara di dunia. Seperti di Uni Eropa, dalam menyajikan laporan konsolidasian sesuai IFRS sudah diharuskan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, sedangkan di Inggris IFRS merupakan tantangan namun akhirnya mereka menyambut baik harmonisasi standar tersebut. Di Singapura, IFRS sudah diadopsi secara penuh.

Indonesia sebagai anggota G-20, sepakat dengan anggota lainnya untuk mengadopsi IFRS secara penuh sebagai standar pelaporan keuangan negara mereka. Rencananya, pada tahun 2012 perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan sudah benar-benar mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai organisasi pembuat standar keuangan di Indonesia, sudah melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Sampai dengan akhir tahun 2011, DSAK telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengadopsi IFRS dan IAS.

Perubahan standar ini sangat mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia. Selain dalam hal laporan keuangan, perubahan ini juga akan mempengaruhi sistem informasi dan organisasi perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan *go public*, wajib menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti standar baru ini.

Perlunya pemahaman akan penerapan IFRS dan standar PSAK yang terbaru hasil konvergensi IFRS, menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang yang bekerja dalam bidang keuangan, terutama bidang akuntansi. Evaluasi dari sebuah perusahaan yang telah menerapkan IFRS maupun menerapkan PSAK hasil konvergensi dengan IFRS dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi perusahaan yang akan menerapkannya.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom/Telkom Group) merupakan salah satu perusahaan *go public* terbesar di Indonesia yang telah mengambil langkah awal dengan menerapkan IFRS lebih dini dibandingkan dengan perusahaan lainnya (*first adopter* IFRS). Hal ini dikarenakan Telkom berpartisipasi aktif dalam penjualan bursa saham di *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *London Stock Exchange* (LSE). Melihat adanya berbagai peluang dan kelebihan jika menggunakan IFRS, maka Telkom berinisiatif untuk menyajikan laporan keuangan berbasis IFRS untuk NYSE dan LSE.

Selain IFRS, Telkom juga menggunakan PSAK dalam laporan keuangannya untuk diserahkan kepada BAPEPAM karena saham Telkom juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana saat ini sebagian besar PSAK sudah terkonvergensi dengan IFRS.

Penelitian ini ingin mengevaluasi penerapan IFRS, khususnya ketika adopsi pertama (*first adopter*) pada suatu perusahaan, yakni pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sehingga dapat diketahui secara riil pengaruh dari implementasi IFRS bagi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apa saja perbedaan yang material antara laporan keuangan versi IFRS dengan laporan keuangan versi PSAK, dimana PSAK saat ini telah banyak mengadopsi IFRS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pengaruh penerapan IFRS terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk saat menerapkan IFRS?
3. Apa saja perbedaan yang material antara laporan keuangan versi IFRS dengan laporan keuangan versi PSAK bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada PSAK yang berlaku sampai dengan Desember 2011.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui pengaruh penerapan IFRS pada PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk
2. Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk saat menerapkan IFRS
3. Mengetahui perbedaan yang material antara laporan keuangan versi IFRS dengan laporan keuangan versi PSAK pada PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dan pembinaan.

2. Bagi perusahaan *go public* di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran dalam hal adopsi IFRS.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan menjadi referensi bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut dimasa yang akan datang.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan implementasi dari suatu teori yang telah dipelajari di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil pustaka yang dapat dijadikan dasar pengolahan data.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, serta teknis analisis data.

BAB IV. Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha serta kebijakan akuntansi perusahaan.

BAB V. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengaruh penerapan IFRS bagi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, kendala yang dihadapi saat penerapan IFRS dan perbedaan antara laporan keuangan IFRS dan laporan keuangan PSAK.

BAB VI. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IFRS : Harmonisasi Standar

Saat ini terdapat dua badan standar akuntansi internasional utama yakni *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *Financial Accounting Standards Board (FASB)*. IFRS ditetapkan oleh IASB, dan lebih dari 130 negara di dunia mengikuti standar ini. Sedangkan kebanyakan perusahaan di Inggris, mengikuti standar yang dikeluarkan oleh FASB yang disebut sebagai *generally accepted accounting principles (GAAP)*.

Adanya keterbukaan pasar yang semakin meng-global, membuat investor asing kesulitan untuk membaca laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan standar yang dianut oleh masing – masing perusahaan di negara yang berbeda. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, maka IASB dan FASB bekerja sama dan berusaha mengurangi perbedaan standar tersebut. Proses ini disebut dengan proses konvergensi (*convergence*) dimana U.S GAAP diharmonisasikan dengan IFRS.

Dengan adanya konvergensi IFRS ini, diharapkan akan mempermudah perusahaan dan investor dalam menilai perusahaan investee dengan membaca laporan keuangannya.

Struktur IFRS mencakup:

1. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001
2. *International Accounting Standards* (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001
3. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) – setelah tahun 2001
4. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) – sebelum tahun 2001

B. Implementasi IFRS

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih untuk menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi keuangannya. Sampai dengan tahun 1974, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengikuti standar akuntansi Amerika yang dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima umum (U.S GAAP). Pada tahun 1984 prinsip akuntansi ini kemudian ditetapkan menjadi standar akuntansi. Pada akhir tahun 1984, standar akuntansi di Indonesia beralih haluan dan mengikuti standar yang bersumber pada IASC (*International Accounting Standard Committee*). Sejak tahun 1994, IAI sudah berniat untuk mengikuti IASC / IFRS. Dan pada tahun 2008 diharapkan perbedaan pasal PSAK dengan IFRS dapat

diselesaikan, sehingga pada tahun 2012 IFRS akan benar-benar diterapkan di Indonesia (*full adopted*).

Gambar 2.1. Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia:

Sampai akhir tahun 2011, DSAK telah mengeluarkan dan menetapkan PSAK yang sudah mengkonvergensi IFRS serta menghapus standar-standar yang tidak relevan. Dan perusahaan di Indonesia telah mulai menerapkan PSAK tersebut.

C. Dampak Adopsi IFRS

Dampak adopsi IFRS dibagi ke dalam empat bagian, yakni:

1. Dampak pada sistem akuntansi

a) Adanya peningkatan penggunaan nilai wajar (*fair value*)

Standar IFRS akan lebih condong kepada penggunaan nilai wajar terutama untuk properti investasi, beberapa aset tidak berwujud, aset keuangan dan aset biologis. Dengan demikian

maka diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk asset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.

b) Penggunaan “*Judgement*”

Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip (*principle based*), akan lebih banyak dibutuhkan “*judgement*” untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.

c) Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko, baik risiko kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.

2. Dampak pada Informasi dan Teknologi (IT) perusahaan

Sistem IT yang ada belum tentu dapat memenuhi persyaratan IFRS. Misalnya adalah IFRS yang mengatur instrumen keuangan (IAS 39, IFRS 7) yang akan diadopsi dalam PSAK 50-55.

3. Dampak pada sumber daya manusia

a) Standar IFRS menganut *principle based*, bukan *rule based* sehingga para pemakai standar diharapkan dapat membuat

lebih banyak *professional judgement* di dalam memanfaatkan standar tersebut.

- b) Bukan hanya SDM yang terkait dengan akuntansi namun juga SDM dibidang lain harus mengerti IFRS secara baik seperti dibidang *procurement, marketing* maupun legal.
- c) Investasi SDM dalam meningkatkan pengetahuan IFRS harus dilakukan secara berkesinambungan mengingat IFRS adalah *moving target* yang berubah secara dinamis sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh IASB.

4. Dampak terhadap sistem organisasi perusahaan

- a) IFRS bukan hanya merubah cara perusahaan membuat laporan keuangan tetapi juga merubah bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya.
- b) Perubahan proses bisnis dapat mengakibatkan perubahan struktur organisasi perusahaan dan sistem pengendalian internal, khususnya untuk pelaporan keuangan agar dapat memenuhi tujuan perusahaan dan memenuhi semua persyaratan IFRS.

D. PSAK Berlaku Efektif di Indonesia

Sampai dengan saat ini DSAK sudah mengkonvergensi sebagian besar standar IFRS ke dalam PSAK. Berikut ini adalah daftar

PSAK hasil konvergensi dengan IFRS yang efektif berlaku pada tahun 2012.

Tabel 2.1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Berlaku 1 Januari 2012

No	PSAK / ISAK / PPSAK UMUM		Tanggal Efektif
1	PSAK 1 (2009)	Penyajian Laporan Keuangan	1-Jan-11
2	PSAK 2 (2009)	Laporan Arus Kas	1-Jan-11
3	PSAK 3 (2010)	Laporan Keuangan Intern	1-Jan-11
4	PSAK 4 (2009)	Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	1-Jan-11
5	PSAK 5 (2009)	Segmen Operasi	1-Jan-11
6	PSAK 7 (2010)	Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi	1-Jan-11
7	PSAK 8 (2010)	Peristiwa setelah Periode Pelaporan	1-Jan-11
8	PSAK 10 (2009)	Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	1-Jan-12
9	PSAK 12 (2009)	Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama	1-Jan-11
10	PSAK 13 (2011)	Properti Investasi	1-Jan-12
11	PSAK 14 (2008)	Persediaan	1-Jan-09
12	PSAK 15 (2009)	Investasi pada Entitas Asosiasi	1-Jan-11
13	PSAK 16 (2011)	Aset Tetap	1-Jan-12
14	PSAK 18 (2010)	Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	1-Jan-12
15	PSAK 19 (2010)	Aset Tak Berwujud	1-Jan-11
16	PSAK 22 (2010)	Kombinasi Bisnis	1-Jan-11
17	PSAK 23 (2010)	Pendapatan	1-Jan-11
18	PSAK 24 (2010)	Imbalan Kerja	1-Jan-12

Sumber: <http://www.iaiglobal.or.id>

Tabel 1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Berlaku 1 Januari 2012 (lanjutan)

19	PSAK 25 (2009)	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	1-Jan-11
20	PSAK 26 (2011)	Biaya Pinjaman	1-Jan-12
21	PSAK 28 (2010)	Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian	1-Jan-12
22	PSAK 30 (2011)	Sewa	1-Jan-12
23	PSAK 33 (2010)	Aktivitas Pengapusan Lapisan Tanah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum	1-Jan-12
24	PSAK 34 (2010)	Kontrak Konstruksi	1-Jan-12
25	PSAK 38 (2004)	Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	1-Jan-05
26	PSAK 36 (2010)	Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa	1-Jan-12
27	PSAK 44	Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate	1-Jan-98
28	PSAK 45 (2010)	Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba	1-Jan-12
29	PSAK 46 (2010)	Pajak Penghasilan	1-Jan-12
30	PSAK 48 (2009)	Penurunan Nilai Aset	1-Jan-11
31	PSAK 50 (2010)	Insurumen Keuangan: Penyajian	1-Jan-12
32	PSAK 51 (2003)	Akuntansi Kuasi-Reorganisasi	1-Jan-00
33	PSAK 53 (2010)	Pembayaran Berbasis Saham	1-Jan-12
34	PSAK 55 (2011)	Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	1-Jan-12
35	PSAK 56 (2010)	Laba Per Saham	1-Jan-12
36	PSAK 57 (2009)	Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	1-Jan-11
37	PSAK 58 (2009)	Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan	1-Jan-11
38	PSAK 60	Instrumen Keuangan: Pengungkapan	1-Jan-12
39	PSAK 61	Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah	1-Jan-12
40	PSAK 62	Kontrak Asuransi	1-Jan-12

Sumber: <http://www.iaiglobal.or.id>

Tabel 1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Berlaku 1 Januari 2012 (lanjutan)

41	PSAK 63	Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	1-Jan-12
42	PSAK 64	Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral	1-Jan-12
43	ISAK 7 (2009)	Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus	1-Jan-11
44	ISAK 8	Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa	1-Jan-08
45	ISAK 9	Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa	1-Jan-11
46	ISAK 10	Program Loyalitas Pelanggan	1-Jan-11
47	ISAK 11	Distribusi Aset Non kas kepada Pemilik	1-Jan-11
48	ISAK 12	Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non moneter oleh Venturer	1-Jan-11
49	ISAK 13	Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.	1-Jan-12
50	ISAK 14	Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web	1-Jan-11
51	ISAK 15	PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya	1-Jan-12
52	ISAK 16	Perjanjian Konsesi Jasa	1-Jan-12
53	ISAK 17	Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai	1-Jan-11
54	ISAK 18	Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi	1-Jan-12
55	ISAK 19	Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	1-Jan-12
56	ISAK 20	Pajak penghasilan - perubahan dalam status pajak entitas atau pemegang saham	1-Jan-12
57	ISAK 22	Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan	1-Jan-12
58	ISAK 23	Sewa Operasi – Insentif	1-Jan-12
59	ISAK 24	Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa	1-Jan-12
60	ISAK 25	Hak Atas Tanah	1-Jan-12
61	ISAK 26	Penilaian Ulang Derivatif Melekat	1-Jan-12
62	PPSAK 1	Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Perusahaan Hutan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan jalan Tol	1-Jan-10

Sumber: <http://www.iaiglobal.or.id>

Tabel 1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Berlaku 1 Januari 2012 (lanjutan)

63	PPSAK 2	Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang	1-Jan-10
64	PPSAK 3	Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah	1-Jan-10
65	PPSAK 4	Pencabutan PSAK 31: Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana	1-Jan-10
66	PPSAK 5	Pencabutan ISAK 06 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing	1-Jan-10
67	PPSAK 6	Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham: ISAK 2 Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan.	1-Feb-11
68	PPSAK 7	Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate	1-Jan-12 dan
			1-Jan 13
69	PPSAK 8	Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian	1-Jan-12
70	PPSAK 9	Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Par 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual	1-Jan-12
71	PPSAK 11	Pencabutan PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi	1-Jan-12

No	ISAK DAN PPSAK UMUM BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013		
1	ISAK 21	Perjanjian Konstruksi Real Estate	
2	PPSAK 10	Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi	

Sumber: <http://www.iaiglobal.or.id>

E. IFRS 1 : *First time adoption*

1. Tujuan

IFRS 1 pertama kali Adopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional menetapkan prosedur yang harus diikuti suatu entitas ketika mengadopsi IFRS untuk pertama kalinya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bertujuan umum.

2. Definisi pertama kali adopsi

Sebuah adopter pertama kali adalah sebuah entitas yang untuk pertama kalinya, membuat pernyataan eksplisit dan jelas bahwa laporan keuangan bertujuan umum yang sesuai dengan IFRS.

Entitas mungkin menjadi adopter pertama kali jika, pada tahun sebelumnya telah disiapkan laporan keuangan berdasarkan IFRS untuk digunakan manajemen internal, dan laporan keuangan tidak dibuat tersedia untuk pemilik atau pihak eksternal seperti investor atau kreditur. Jika satu set pernyataan IFRS keuangan, untuk alasan apapun sudah tersedia bagi pemilik atau pihak eksternal pada tahun sebelumnya, maka badan sudah akan dianggap mengacu pada IFRS dan IFRS 1 tidak berlaku lagi.

Entitas juga bisa menjadi adopter pertama kali jika, pada tahun sebelumnya laporan keuangannya:

- a. Menggunakan beberapa pasal IFRS, atau
- b. Menggunakan rekonsiliasi dari PSAK sebelumnya ke IFRS.

3. Penyesuaian yang dibutuhkan untuk berpindah dari PSAK sebelumnya ke IFRS pada saat pertama kali adopsi:

a. Penghentian pengakuan beberapa aset dan kewajiban PSAK sebelumnya

Entitas harus menghilangkan aktiva dan kewajiban dari neraca pembukaan berdasarkan PSAK sebelumnya jika hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk pengakuan dalam IFRS. Sebagai contoh: jika entitas PSAK sebelumnya telah mengizinkan akrual kewajiban untuk "cadangan umum", restrukturisasi, kerugian operasi masa depan, atau overhaul besar yang tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai suatu ketentuan di bawah IAS 37, akun ini dieliminasi dalam neraca awal IFRS.

b. Pengakuan beberapa aset dan kewajiban tidak diakui berdasarkan PSAK sebelumnya

Sebaliknya, entitas harus mengakui seluruh aktiva dan kewajiban yang diperlukan untuk diakui oleh IFRS, bahkan jika mereka tidak pernah diakui berdasarkan PSAK sebelumnya. Sebagai contoh: IAS 39 membutuhkan pengakuan dari semua aset keuangan dan kewajiban derivatif, termasuk derivatif melekat. Ini tidak diakui di bawah PSAK.

c. Melakukan Reklasifikasi

Entitas ini harus mereklasifikasi neraca PSAK sebelumnya ke dalam klasifikasi IFRS yang sesuai. Contoh: IAS 10 tidak mengizinkan dividen mengklasifikasikan dinyatakan atau diajukan setelah tanggal neraca sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Jika kewajiban tersebut diakui berdasarkan IFRS sebelumnya itu akan terbalik di neraca pembukaan IFRS.

d. Pengukuran

Prinsip pengukuran umum untuk menerapkan IFRS efektif dalam mengukur seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Penyesuaian yang dibutuhkan untuk berpindah dari PSAK sebelumnya ke IFRS pada saat pertama kali adopsi harus diakui langsung dalam laba ditahan atau, jika sesuai kategori lain dari ekuitas pada tanggal transisi ke IFRS.

4. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Suatu Adopter Pertama Kali

IFRS 1 mengharuskan pengungkapan yang menjelaskan bagaimana transisi dari PSAK ke IFRS mempengaruhi entitas dalam laporan kinerja keuangan dan arus kas. Ini termasuk:

- a. Rekonsiliasi dari ekuitas dilaporkan berdasarkan PSAK sebelumnya ke ekuitas berdasarkan IFRS
- b. Rekonsiliasi dari total pendapatan komprehensif untuk periode tahunan terakhir dilaporkan berdasarkan PSAK sebelumnya

terhadap total pendapatan komprehensif berdasarkan IFRS untuk periode yang sama

- c. Penjelasan tentang penyesuaian materi yang dibuat dalam mengadopsi IFRS untuk pertama kalinya baik itu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas
- d. Jika kesalahan dalam laporan keuangan PSAK sebelumnya ditemukan dalam proses transisi ke IFRS, kesalahan tersebut harus diungkapkan secara terpisah
- e. Jika entitas diakui atau membalikkan kerugian penurunan nilai ketika mempersiapkan neraca IFRS, hal ini harus diungkapkan
- f. Jika entitas telah memilih untuk menerapkan salah satu pengakuan khusus dan pengecualian pengukuran diizinkan berdasarkan IFRS 1, misalnya jika digunakan nilai wajar yang dianggap biaya

5. Pengecualian Opsional

Berdasarkan IFRS 1 adopter pertama IFRS dapat memilih pengecualian atas pengukuran dan prinsip pernyataan dari beberapa hal di bawah ini:

- a. Kombinasi bisnis (yang terjadi sebelum tanggal transisi ke IFRS)
- b. Nilai wajar atau revaluasi yang dianggap sebagai harga perolehan (misalnya properti, pabrik dan peralatan, asset tak

berwujud dan properti investasi yang diukur atas dasar nilai wajar menurut PABU)

- c. Imbalan karyawan
- d. Selisih transaksi kumulatif
- e. Penetapan instrumen keuangan sebelumnya
- f. Sewa guna usaha
- g. Imbalan karyawan

F. PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

Standar ini mengatur pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi. Untuk pengakuan pendapatan telekomunikasi interkoneksi diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul dari interkoneksi untuk hubungan lokal, interlokal dan hubungan transit diakui sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara dan ditentukan sesuai dengan perjanjian kontraktual
2. Pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi untuk hubungan internasional diakui sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara dan ditentukan sesuai dengan konvensi internasional
3. Apabila informasi mengenai jumlah bagian pendapatan sebenarnya belum diketahui, maka jumlahnya harus ditentukan berdasarkan estimasi yang layak.

Pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa atas pemasangan baru dan mutasi diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan
2. Pendapatan atas pemakaian fasilitas telekomunikasi yang didasarkan atas tarif dan satuan ukuran (seperti pulsa, menit bicara, kata dan lain-lain) diakui sebesar jumlah pemakaian sebenarnya.
3. Pendapatan jasa sehubungan dengan penggunaan sarana telekomunikasi diakui sesuai dengan jumlah penggunaan sebenarnya sesuai dengan periode berjalan.
4. Pendapatan pemakaian telepon umum koin diakui pada saat koin diambil
5. Pendapatan atas penjualan kartu telepon diakui pada saat kartu diserahkan, kecuali terdapat estimasi yang andal.

Pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan investor diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa telekomunikasi dari kerja sama diakui sebesar bagian pendapatan sebenarnya sesuai dengan perjanjian kontraktual
2. Aktiva hasil dari kerja sama dengan pihak ketiga harus dikapitalisasi oleh pihak penyelenggara sebagai aktiva tetap kerja sama sebesar biaya perolehan aktiva apabila berdasarkan perjanjian kontraktual memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat kepastian bahwa penyelenggara akan memperoleh suatu aktiva yang penyerahan kepemilikannya baru dilaksanakan diakhir masa kerja sama, dan
- b. Penyelenggara terbebas dari tuntutan hukum pihak ketiga atas perolehan aktiva tersebut, dan
- c. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan

G. Sewa Guna Usaha

1. IAS 17 – Lease

Sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang menyewakan (*lessor*) menjamin hak untuk menggunakan suatu aset untuk suatu periode yang disetujui untuk suatu pembayaran. Suatu sewa guna usaha dapat diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha pembiayaan (*finance lease*), apabila keseluruhan risiko dan imbalan kepemilikan ditransfer kepada pihak yang menyewa (*lessee*). Apabila risiko dan imbalan kepemilikan tidak ditransfer, maka diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha operasi (*Operating lease*).

2. PSAK 47 Akuntansi Tanah

Berdasarkan standar ini hak atas tanah dicatat sebagai tanah dan tidak disusutkan. Tanah tidak disusutkan, kecuali :

- a. Kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas

- b. Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja saat proyek selesai
- c. Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila tanah disusutkan, maka nilai tanah disajikan berdasar nilai perolehan atau nilai terbawa lain sesuai dengan revaluasi tanah atau PSAK tentang penurunan nilai aset kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

H. Pendapatan

1. IAS 18 – Revenue

Berdasarkan IFRIC 15 (Perjanjian mengenai konstruksi *real estate*) pengakuan pendapatan yang diakui oleh pengembang *real estate* berkaitan dengan penjualan unit sebelum konstruksi selesai. Jika unit yang dijual sudah selesai dibangun atau pembeli tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan struktur maupun desain, maka pendapatan harus diakui pada saat penyerahan. Akan tetapi, apabila pembeli mempunyai otoritas untuk menetapkan perubahan besar dalam hal struktur maupun desain sebelum atau selama periode konstruksi, maka pendapatan harus diakui sesuai dengan IAS 11 mengenai kontrak konstruksi dan juga berdasarkan standar ini.

Pengakuan pendapatan berdasarkan IFRIC 13 (Program Loyaitas Konsumen) menunjukkan akuntansi untuk pemberian penghargaan

loyalitas (seperti poin) oleh entitas kepada pelanggannya. Entitas semacam ini harus:

- a. Mengalokasikan suatu hasil dari awal penjualannya kepada kredit penghargaan (*award credits*) sebagai suatu liabilitas. Jumlah dari hasil penjualan yang dialokasikan untuk kredit penghargaan diukur sesuai dengan nilai wajarnya, yaitu jumlah ketika kredit penghargaan tersebut dapat dijual.
- b. Mengakui bagian yang ditangguhkan dari hasil penjualan sebagai pendapatan hanya jika telah memenuhi liabilitasnya.

2. ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan

Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa mereka. Jika pelanggan membeli barang atau jasa, entitas akan memberikan penghargaan kredit kepada pelanggan (seringkali disebut sebagai “poin”).

Pelanggan dapat menukar (*redeem*) penghargaan kredit tersebut dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga. Entitas harus menerapkan PSAK 23 (pendapatan) dan mencatat penghargaan sebagai komponen yang diidentifikasi secara terpisah atas transaksi penjualan pada saat diberikan (saat “penjualan awal”). Nilai wajar atas imbalan yang diterima atau tagihan sehubungan dengan penjualan awal harus dialokasikan antara penghargaan kredit dan komponen lain dari penjualan. Imbalan yang dialokasikan terhadap

penghargaan kredit harus diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya, yaitu jumlah penghargaan kredit jika dijual secara terpisah. Standar ini berlaku efektif tanggal 1 januari 2011.

3. PSAK 34 kontrak konstruksi (revisi 2010)

Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada peristiwa masa depan. Estimasi sering kali perlu direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya.

Standar ini akan berlaku efektif mulai tanggal 1 januari 2012.

I. Imbalan Karyawan

1. IAS 19

Berdasarkan standar ini, seorang pemberi kerja harus mengakui liabilitas apabila karyawannya menukarkan masa kerjanya dengan imbalan yang dibayarkan di masa depan. Pemberi kerja juga harus mengakui beban apabila imbalan secara ekonomis diterima oleh karyawan dari lamanya bekerja. Jenis imbalan karyawan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Imbalan jangka pendek, seperti gaji atau upah yang dibayarkan secara periodik

- b. Imbalan pasca kerja, seperti pembayaran pensiun atau pembayaran asuransi
- c. Imbalan jangka panjang lainnya, seperti imbalan cacat
- d. Imbalan terminasi, seperti pembayaran pesangon

2. PSAK 24 (revisi 2010)

Dalam PSAK ini terdapat dua alternatif untuk mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial pada saat transisi, yaitu:

- a. Pendekatan koridor seperti yang disyaratkan dalam PSAK 24
- b. Tidak menggunakan koridor, namun entitas mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif pada tahun keuntungan atau kerugian aktuarial itu terjadi.

Imbalan kerja mencakup:

- a. Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah dan gaji
- b. Imbalan pasca kerja, seperti pensiun atau asuransi jiwa pasca kerja
- c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti hari raya, dan penghargaan masa kerja
- d. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Cuti berimbang yang boleh diakumulasi adalah cuti yang dapat digunakan pada periode masa depan apabila hak cuti periode berjalan tidak digunakan sebelumnya. Cuti berimbang yang boleh diakumulasi

dapat bersifat *vesting* (karyawan berhak memperoleh pembayaran untuk setiap hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus) atau *nonvesting*.

J. Nilai Tukar Mata Uang Asing

1. IAS 21

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan perekonomian primer di mana suatu entitas beroperasi. Suatu mata uang fungsional entitas mencerminkan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya. Oleh karena itu, suatu entitas harus menentukan mata uang fungsionalnya.

Prinsip-prinsip translasi untuk aset dan liabilitas keuangan dari suatu operasi luar negeri:

- a. Aset dan liabilitas keuangan moneter awalnya diukur atas dasar nilai wajar, biaya yang diamortisasikan, atau biaya dalam mata uang fungsional dari operasi luar negeri. Selanjutnya ditranslasikan dengan menerapkan nilai tukar penutup; dan
- b. Asset keuangan non-moneter ditranslasikan dengan menggunakan nilai tukar penutup apabila dicatat atas dasar nilai wajar dalam mata uang asing.

2. PSAK 52

Pernyataan dalam SAK 52 ini bertujuan mengatur mata uang yang digunakan oleh perusahaan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan. Ruang lingkup dalam pernyataan ini harus diterapkan untuk

semua perusahaan yang akan atau telah menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan.

Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke rupiah, apabila mata uang fungsional berubah dari bukan rupiah ke rupiah. Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan harus dilakukan pada awal tahun buku, tidak di tengah tahun buku.

K. Biaya Pinjaman

1. IAS 23 – Borrowing Cost

Biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lain yang terjadi oleh suatu entitas dalam hubungannya dengan dana pinjaman. Biaya pinjaman yang secara langsung diatribusikan kepada akuisisi, konstruksi, atau produksi dari suatu aset yang berkualifikasi harus dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset. Aset berkualifikasi adalah suatu aset yang mengambil periode waktu yang substansial untuk siap dijual atau digunakan.

2. PSAK 26 (revisi 2011)

Komponen biaya pinjaman meliputi:

- a. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif
- b. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan

- c. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sebagai penyesuaian dan atas biaya bunga

PSAK 26 Biaya pinjaman revisi 2011 baru efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012.

L. Investasi Pada Entitas Asosiasi

1. IAS 28

Investor harus mencatat investasi pada entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas. Bagian investor atas laba atau rugi menurut metode ekuitas harus ditentukan atas dasar laporan keuangan terbaru yang tersedia dari perusahaan asosiasi.

Apabila terdapat *goodwill* yang timbul karena biaya perolehan investasi yang melebihi bagian investor dari nilai wajar bersih aset dan liabilitas bersih entitas asosiasi, dimasukkan ke dalam nilai yang tercatat (*carrying value*) investasi. Sesuai dengan IFRS 3 Kombinasi Bisnis, *goodwill* tidak boleh diamortisasi. *Goodwill* negatif yang timbul karena bagian investor dari nilai wajar aset bersih dari entitas asosiasi melebihi biaya perolehan harus dimasukkan sebagai pendapatan dalam penentuan bagian investor dari laba atau rugi entitas asosiasi.

2. PSAK 15

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Jika tidak lagi memenuhi untuk dicatat sesuai

PSAK 58, investasi kembali dicatat dengan metode ekuitas sejak tanggal diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Investasi dicatat dengan dengan metode ekuitas sejak tanggal memenuhi definisi entitas asosiasi (pengaruh signifikan). Jika terdapat selisih (positif atau negatif) antara biaya perolehan dengan bagian investor atas nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi, maka:

- a. *Goodwill* disajikan sebagai bagian dari nilai tercatat investasi, tidak boleh diamortisasi
- b. Selisih lebih nilai wajar neto aset dan liabilitas dengan biaya perolehan dimasukkan sebagai penghasilan pada saat investasi diperoleh.

Penyesuaian dilakukan atas penyusutan aset berdasarkan nilai wajar dan penurunan *goodwill* yang diakui entitas asosiasi.

M. Aset Tak Berwujud

1. IAS 38

Standar ini menetapkan suatu entitas untuk mengakui suatu aset tak berwujud, apakah dibeli atau diciptakan sendiri (menurut biaya perolehannya) apabila:

- a. Dimungkinkan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang dapat diatribusikan kepada aset yang akan mengalir kedalam entitas; dan
- b. Biaya perolehan aset yang dapat diukur secara andal

Apabila suatu aset tak berwujud tidak memenuhi kedua definisi di atas maka pengeluaran atas asset tersebut harus diakui sebagai beban.

Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaatnya harus dikaji ulang setiap periode pelaporan guna menetapkan apakah peristiwa dan kondisi terus mendukung penilaian masa tidak terbatas aset tersebut. Aset juga harus dinilai atas potensi penurunan nilainya sesuai dengan IAS 36 mengenai Penurunan Nilai Aset.

2. PSAK 19

Aset tidak berwujud harus diakui apabila:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset karena *goodwill* tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehannya.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tersebut. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari masa manfaat tidak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam

perkiraan akuntansi sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan kesalahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif.

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, dan apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (K. Yin, 2009).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Jalan Japati No. 1 Bandung, 40133 Jawa Barat

2. Waktu Penelitian

Tanggal 21 – 25 Mei 2012

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat – keadaannya akan diteliti.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah divisi gugus tugas IFRS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yakni sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan versi IFRS dan versi PSAK PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, serta buku pedoman kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan.

D. Data yang Diperlukan

1. Gambaran Umum Perusahaan
2. Struktur Organisasi Perusahaan
3. Laporan Keuangan IFRS dan Laporan Keuangan PSAK PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
4. Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi Perusahaan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan karyawan yang berhubungan dengan pencatatan keuangan dan pengembangan IFRS perusahaan.

b. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui catatan dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dekriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara kepada karyawan mengenai pengaruh adopsi IFRS bagi perusahaan

b. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara

2. Untuk menjawab pertanyaan nomor dua, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dekriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan wawancara kepada karyawan mengenai kendala yang dihadapi saat adopsi IFRS bagi perusahaan

b. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara

3. Untuk menjawab pertanyaan nomor tiga, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dekriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan laporan keuangan IFRS dengan laporan keuangan PSAK dan menganalisa apakah ada perbedaan pada kedua laporan tersebut.

b. Menganalisa perbedaan yang telah ditemukan, mencari sebab perbedaan dan mencari apakah perbedaan yang ada mempunyai pengaruh yang material terhadap laporan keuangan

c. Mengkonfirmasi perbedaan yang ditemukan, sebab perbedaan dan pengaruh yang diakibatkan terhadap laporan keuangan kepada karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

d. Menarik kesimpulan dari hasil analisa.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom/Telkom grup) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan layanan InfoComm, telepon kabel tidak bergerak (*fixed wireline*) dan telepon nirkabel tidak bergerak (*fixed wireless*), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.

Sebagai BUMN, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai sebagian besar saham biasa perusahaan sedangkan sisanya dimiliki oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), *New York Stock Exchange* (“NYSE”), *London Stock Exchange* (“LSE”) dan *Tokyo Stock Exchange* (tanpa *listing*).

Pada mulanya, Telkom merupakan bagian dari “*Post en Telegraafdienst*” yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April

1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi Perseroan Terbatas Milik Negara (“Persero”).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, SH No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992. Tambahan No. 210.

Seiring dengan jalannya Pemerintahan Republik Indonesia serta perubahan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (BAPEPAM-LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaries A. Partomuan Pohan, S.H., LMM. No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasarkan Surat No. AHU.46312.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam berita

Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20155

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Telkom

“Untuk menjadi perusahaan telekomunikasi, informasi, media dan *edutainment* (TIME) terkemuka di wilayah Indonesia”.

2. Misi Telkom

- Memberikan layanan TIME dengan kualitas yang bagus dan dengan harga yang kompetitif
- Menjadi teladan bagi perusahaan di Indonesia dengan pengelolaan terbaik

C. Lokasi Perusahaan

PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk (Telkom Group) terletak di jalan Japati No. 1 Bandung, Jawa Barat. Kantor ini merupakan kantor pusat dari perusahaan Telkom Group.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi :

1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa komunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku
3. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan komunikasi dan informatika
4. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan

Kegiatan perusahaan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri meliputi telepon, teleks, telegram, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan seluler. Pada tahun 1995, perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra usaha dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi

dilima dari tujuh divisi regional (*Divre*) melalui pola Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka:

1. Mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi
2. Menjadikan perusahaan sebagai operator bertaraf internasional
3. Meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian karyawannya

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996, perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (*local wireline* dan *fixed wireless*) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri (SLJJ) untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa komunikasi untuk dan atas nama perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 36 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi meliputi:

1. Jaringan telekomunikasi
2. Jasa telekomunikasi
3. Telekomunikasi khusus

Pada tahun 2000, masa hak eksklusif perusahaan untuk menyelenggarakan jasa komunikasi jaringan lokal tetap dan SLJJ telah dipersingkat dari masa berakhir Desember 2010 menjadi Agustus 2002. Perusahaan telah memperoleh izin komersial untuk menyelenggarakan jasa sambungan langsung internasional (SLI) berdasarkan keputusan menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP. 162 tahun 2004 pada tanggal 13 Mei 2004.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: Data diolah

F. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.

Gambar 4.2. Anak Perusahaan Telkom

Sumber: data diolah

Tabel 4.1. Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung (Lebih dari 50%)

Anak Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Akuisisi	Presentase Hak Kepemilikan (2011)
PT Telekomunikasi Selular	Jasa telepon selular (GSM)	26 Mei 1995	65%
PT Multimedia Nusantara	Multimedia, TV berbayar, jasa sistem informasi	9 Mei 2003	100%
PT Telekomunikasi Indonesia Internasional	<i>Fixed line phone services (KSO-III West Java ad Banten), International telecommunication</i>	31 Juli 2003	100%
PT Graha Sarana Duta (SGD) / Jakarta, Indonesia	Penyewaan Kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan pengembang / 25 April 2001	25 April 2001	99,99%
PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra) / Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi / 17 Mei 2001	17 Mei 2001	100%
PT Pramindo Ikat Nusantara	<i>Telecommunication services and development</i>	15 Agustus 2002	100%
PT Infomedia Nusantara	<i>Telephone directory and information services, Call center</i>	22 September 1999	100%

Sumber: data diolah

Tabel 4.1. Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung (Lebih dari 50%) (lanjutan)

PT Indonusa Telemedia	Multimedia (internet, TV berbayar)	7 Mei 1997	100%
PT Napsindo Primatel Internasional	<i>Network access point</i>	29 Desember 1998	60%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.2. Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung (Antara 20% - 50%)

Anak Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal akuisisi	Hak Kepemilikan Tahun 2011
PT Patra Telekomunikasi Indonesia	<i>VSAT services</i>	28 September 1995	40%
PT Citra Sari Makmur	<i>VSAT and Consulting services</i>	14 Februari 1986	25%
PT Pasifik SATelit Nusantara	<i>Satellite transponder and satellite-based cellular communication</i>	2 Juli 1991	22,38%

Sumber : data diolah

Tabel 4.3. Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung (Kurang dari 20%)

Anak Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal akuisisi	Hak Kepemilikan Tahun 2011
PT. Batam Bintan Telekomunikasi	<i>Fixed line phone services (Batam dan pulau Bintan)</i>	15 Juni 1996	5%
PT. Pembangunan Telekomunikasi Indonesia	<i>Construction and maintenance of telecommunication facilities</i>	24 desember 1993	2,11%

Sumber: data diolah

Tabel 4.4. Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Tidak Langsung

Anak Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal akuisisi	Hak Kepemilikan
PT. Metranet	<i>Multimedia portal services</i>	17 April 2009	Metra (100%)
PT. Sigma Cipta Caraka	<i>IT and solutions provider</i>	1 Mei 1987	Metra (100%)
PT. Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd	<i>Telecommunications</i>	6 Desember 2007	Tellin (100%)
PT. Telkomsel Finance B.V	<i>Finance</i>	7 Februari 2005	Telkomsel (100%)
PT. Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong)	<i>Telecommunications business</i>	8 Desember 2010	Telin (100%)
PT. Administrasi Medika	<i>Health insurance administration services</i>	25 Februari 2010	Metra (75%)
PT. Balebat Dedikasi Prima	<i>Printing</i>	1 Oktober 2003	Infomedia (65%)
Telekomunikasi Selular Finance Limited	<i>Finance</i>	22 April 2002	Telkomsel (100%)
PT. Finnet Indonesia	<i>Banking and e-payment data communication infrastructure</i>	31 Oktober 2005	Metra (60%)
PT. Melon Indonesi	<i>Value added telephony services and other multimedia services</i>	16 Agustus 2010	Metra (51%)
Scicom Bhd	<i>Contact center service provider</i>	31 Desember 2007	Telin (29,71%)

Sumber: data diolah

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Adopsi IFRS bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom/Telkom Group) mengambil keputusan untuk mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) pada tahun 2009. Keputusan ini diambil karena Telkom melihat banyak keuntungan yang akan didapatkan jika perusahaan menggunakan IFRS.

Pengambilan keputusan beralih menggunakan IFRS akan mendukung peranan Telkom sebagai salah satu perusahaan yang bermain dan terdaftar di *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *London Stock Exchange* (LSE). Keputusan Telkom ini didukung juga oleh para investor, terutama dari Amerika Serikat, karena mereka menilai perusahaan yang sudah menggunakan IFRS lebih andal dan dapat dipercaya.

Pada tahun 2011, laporan keuangan Telkom yang dikirim untuk NYSE telah *full adopted* IFRS. Selain membuat laporan keuangan versi IFRS untuk NYSE, Telkom juga membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia, yang diaudit dan diserahkan ke BAPEPAM.

Alasan mengapa Telkom berani mengambil langkah lebih dini dari pada perusahaan lain untuk mengimplementasikan IFRS pada perusahaannya adalah para investor, terutama investor yang berasal dari Amerika Serikat lebih percaya kepada perusahaan yang telah menggunakan IFRS. Penjelasan tersebut dapat dilihat dari pernyataan Agus Heri, kepala gugus tugas IFRS PT. Telkom.

“IFRS itu kan salah satunya ingin menstandarkan seluruh laporan keuangan global menjadi sama. Paling tidak koridornya sama, interpretasinya sama, jadi investornya semakin percaya. Dengan demikian-kan ukuran kinerja perusahaan menjadi sama. Investor Amerika itu lebih percaya ke perusahaan yang mengimplementasi IFRS. Kira-kira tingkat *confidential* diatas 90% pada perusahaan yang telah menggunakan IFRS”

Alasan lain mengapa Telkom berani mengimplementasikan IFRS lebih dini dibandingkan dengan perusahaan lain bahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), dikarenakan semua perusahaan yang menggunakan IFRS tidak diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi dengan U.S GAAP. Sehingga bisa menekan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan membuat kinerja karyawan menjadi lebih praktis. Penjelasan tersebut dapat dilihat dari pernyataan Agus Heri.

“Di Amerika untuk perusahaan yang menggunakan IFRS tak diharuskan melakukan rekonsiliasi dengan U.S GAAP. Dengan demikian perusahaan akan bisa mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan rekonsiliasi. Lagipula IFRS diambil mayoritas U.S GAAP, sehingga andai tidak menggunakan IFRS nanti kerjanya menjadi *double*, akan sangat tidak efektif. “

Telkom mulai mengkaji dan mempelajari IFRS pada tahun 2009. Hingga saat ini, perusahaan masih melakukan berbagai upaya dan perubahan yang disesuaikan dengan IFRS. Sasaran yang ingin dituju Telkom dengan menerapkan IFRS adalah *quality* dan transparansi, baik dalam segi laporan keuangan maupun dalam hal bisnis.

IFRS bukan hanya berbicara tentang laporan keuangan. Walaupun standar ini mengatur mengenai pelaporan keuangan, namun IFRS juga mempengaruhi keseluruhan bisnis perusahaan.

Bagi Telkom, mengimplementasi IFRS merupakan langkah awal untuk semakin berdiri kokoh dalam persaingan saat ini. Pengaruh yang dirasakan oleh Telkom dengan impementasi IFRS ini adalah:

1. Telkom menjadi partner DSAK dalam melakukan konvergensi IFRS kedalam PSAK. Telkom merupakan perusahaan yang pertama melakukan *full adopt* IFRS di Indonesia dan DSAK sangat mengapresiasi hal tersebut. Sampai dengan saat ini Telkom sering dilibatkan DSAK untuk membuat perubahan konvergensi IFRS ke PSAK. Hal ini diperjelas dengan pernyataan berikut ini.

“...perusahaan juga dilibatkan dalam proses konversi IFRS yang dilakukan oleh DSAK...”

2. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang lebih *valuable* dalam hal tenaga ahli IFRS. Dari tingkat direktur sampai dengan karyawan operasional kurang lebih 60 orang telah

mengerti dan paham mengenai IFRS. Bahkan beberapa diantaranya sudah memiliki ijazah IFRS. Karyawan ini juga sering diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar yang berkaitan dengan IFRS.

3. Para investor dan *stockholder* di Amerika Serikat mendukung penuh upaya Telkom dalam menerapkan IFRS.
4. Sistem informasi dan teknologi perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan IFRS. Awalnya Telkom menggunakan sistem SAP untuk sistem akuntansinya. Namun, setelah dikaji ternyata sistem tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan IFRS. Saat ini sistem informasi akuntansi Telkom telah diperbaharui menjadi ERP. Dan Telkom masih mengembangkan lagi sebuah sistem baru yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK, IFRS, dan pajak.

B. Kendala Penerapan IFRS

Menjadi perusahaan yang pertama kali mengacu pada IFRS bukanlah merupakan hal yang mudah. Dan untuk mengimplementasikan IFRS, Telkom menghadapi beberapa kendala, yakni :

1. Knowledge

Kendala yang terbesar adalah *knowledge*, dimana pengetahuan mengenai IFRS masih kurang. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan memperkuat sumber daya manusia dengan memberikan dan

mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan maupun seminar yang membahas tentang IFRS. Telkom juga tidak segan-segan mengirimkan karyawannya untuk belajar IFRS di luar negeri. Beberapa karyawan sudah mengantungi ijazah diploma IFRS, dari tingkat direktur sampai dengan karyawan operasional diperkuat pengetahuan tentang IFRS.

2. Risiko yang besar

IFRS merupakan sebuah standar baru, dan Telkom merupakan perusahaan pertama yang melakukan *full adopt* IFRS. Telkom menyadari bahwa keputusan ini mengandung risiko yang besar. Ditambah lagi Telkom merupakan perusahaan besar dan senior di bidangnya, yakni dibidang telekomunikasi. Oleh karena itu, Telkom harus berhati-hati dan tidak boleh gagal dalam langkah ini.

Untuk memperkecil risiko, Telkom mengajak konsultan ahli untuk membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengadopsi IFRS. Kegiatan ini dimonitor secara periodik oleh *project manager operation* (PMO) yakni Bapak Agus Hery Prasetyo.

Langkah-langkah yang dilakukan PMO bersama dengan konsultan tersebut adalah :

a. *Preparation*

Persiapan merupakan langkah yang pertama. Di mana tim kerja mempersiapkan semua data yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan terkait dengan IFRS ini.

b. *Planning*

Setelah semua data diperoleh, maka mulai direncanakan pengujian serta perkiraan kemungkinan semua jawaban atas pengujian tersebut.

c. Melakukan *assessment* atau pengujian

Assessment dilakukan untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang berbeda antara kondisi perusahaan dengan IFRS. Sehingga perubahan yang nantinya akan dilakukan tepat sasaran.

d. Mendesain sistem

Hasil dari *assessment* akan ditidakanjuti dengan membuat sebuah sistem yang sesuai dengan IFRS. Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi IFRS di perusahaan.

e. Mengimplementasikan

Implementasi merupakan tahap terakhir. Dari semua hasil penelitian yang dilakukan dan menghasilkan sebuah sistem, kemudian sistem ini diimplementasikan pada perusahaan. Pada saat implementasi pun tetap dilakukan evaluasi untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi.

3. Sistem IT perusahaan yang kurang memenuhi

Sebelumnya, Telkom telah menggunakan SAP untuk sistem informasi dan teknologi. Sistem yang lama hanya bisa menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK. Untuk memenuhi tuntutan

IFRS, Telkom memperbaharui sistem informasi dan teknologi menjadi ERP yang juga masih bagian dari SAP. Sistem ini mampu menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS. Bahkan saat ini Telkom sedang mengembangkan sistem informasi dan teknologinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK, IFRS dan pajak.

C. Kesesuaian IFRS dengan PSAK

Telkom menyerahkan laporan keuangan IFRS kepada NYSC dan membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK untuk diserahkan kepada BAPEPAM. Telkom juga memberikan salinan laporan keuangan IFRS kepada BAPEPAM.

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS Berdasarkan Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk tahun 2011

	IFRS	PSAK	Posisi Telkom
1. Pengakuan Pendapatan			
a. Program Loyalti Pelanggan	Pendapatan dari kredit penghargaan diakui pada saat entitas telah memenuhi kewajibannya atau jika pihak ketiga mengasumsikan kewajiban yang mendasarinya.	PSAK tidak secara khusus membahas penanganan akuntansi untuk program loyalitas pelanggan.	Mengacu ke IFRS
b. Jasa Instalasi	Saat instalasi dianggap tidak menciptakan substansi yang komersial, pendapatan harus ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka estimasi hubungan pelanggan untuk setiap kontrak jasa.	PSAK 35 menyatakan "pendapatan dari instalasi dan transfer diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan". Saat ini PSAK ini telah dicabut.	Mengacu ke IFRS
c. Kontrak Konstruksi	Berdasarkan IFRS, perusahaan hanya dapat menerapkan akuntansi kontrak konstruksi apabila pembeli dapat menentukan elemen struktur utama dari desain.	Pendapatan di bawah perjanjian kontrak konstruksi diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian.	Mengacu ke IFRS

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

2. Perjanjian Koneksi Jasa	Berdasarkan IFRS (IFRIC 12 – Perjanjian Koneksi Jasa) infrastruktur dari perjanjian koneksi jasa tidak diakui sebagai aset tetap, karena entitas tidak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur tersebut.	PSAK tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana pencatatan transaksi koneksi jasa.	Mengacu pada IFRS
3. Sewa			
a. Amortisasi Hak Atas Tanah	sewa tanah diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika secara substansial seluruh risiko dan imbalan akan ditransfer ke lessee, meskipun pada akhir masa sewa tidak akan diberikan ke lessee.	Berdasarkan PSAK 47 hak atas tanah dicatat sebagai tanah dan tidak disusutkan, kecuali dapat diprediksi bahwa manajemen tidak akan dapat memperpanjang atau memperbaharui hak atas tanah.	Mengacu ke IFRS

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>b. Pengaturan Bagi Hasil (Revenue <i>Sharing Arrangement</i> (RSA))</p>	<p>IAS 17, sewa, dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (berdasarkan indikator utama, misalnya <i>ownership</i> ditransfer pada akhir masa sewa, aset sewa bersifat khusus dan hanya lessee dapat menggunakannya tanpa modifikasi)</p>	<p>Efektif 1 Januari 2010, PSAK no 35 telah dicabut dan Telkom harus menjelaskan transaksi RSA sebagai sewa pembiayaan yang setara dengan akuntansi sewa sebagaimana dimaksud dalam IAS 17.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>
<p>4. Biaya Pinjaman</p>	<p>Berdasarkan IFRS, aset yang berkualitas membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual.</p>	<p>Berdasarkan PSAK aset yang berkualitas dimana biaya bunga yang bisa dikapitalisasi harus memakan waktu minimal 12 bulan untuk untuk siap digunakan.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>
<p>5. Imbalan Kerja - Keuntungan Dan Kerugian Aktuarial</p>	<p>IFRS 1 terdapat pilihan pembebasan untuk mengakui semua akumulasi keuntungan aktuarial dan kerugian pada tanggal transisi.</p>	<p>PSAK tidak mengatur hal ini</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>6. Karyawan - Kompensasi Cuti</p>	<p>PSAK dan IFRS mengatur: Imbalan jangka panjang lainnya: Keuntungan karyawan dibayarkan selama mereka bekerja, selain kompensasi ekuitas lebih dari satu tahun setelah akhir periode dimana karyawan memberikan jasa biasanya diakui selama periode jasa itu diberikan. Keuntungan jangka panjang lainnya imbalan kerja dicatat dengan cara yang mirip dengan imbalan pasca kerja. Semua keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa masa lalu segera diakui dalam laporan laba rugi.</p>	<p>Kebijakan perusahaan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya: Hanya anak perusahaan yakni PT Telekomunikasi Seluler yang mengakui layanan penghargaan jangka panjang.</p>	
<p>7. Aktiva Tak berwujud</p>			
<p>a. Goodwill</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 38) goodwill tidak diamortisasi dan pengukurannya tunduk pada metode penurunan pengujian setiap tanggal pelaporan.</p>	<p>Berdasarkan PSAK goodwill diamortisasi dengan metode garis lurus selama maksimum 20 tahun.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>b. Masa Manfaat Tidak Terbatas</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 38) aktiva tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi, melainkan tergantung pada pengukuran penurunan nilai paling tidak setiap tahun.</p>	<p>PSAK tidak mengatur mengenai konsep aktiva tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Biasanya aktiva tidak berwujud diamortisasi berdasarkan garis lurus sepanjang umur manfaatnya, dengan jangka waktu maksimum 20 tahun.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>
<p>8. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi - Penghapusan Keuntungan Yang Belum Direalisasi</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 28) keuntungan dari transaksi dengan perusahaan asosiasi dieliminasi sampai sebatas kepemilikan investor. Kerugian dieliminasi dengan cara yang sama, kecuali untuk transaksi pelepasan aset yang ditransfer terganggu.</p>	<p>PSAK 15 masih belum jelas dalam hal penghapusan laba yang belum direalisasi untuk transaksi dengan perusahaan asosiasi.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>9. Fungsional Valuta Asing</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 21), mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang kondisi perekonomian utama dimana sebuah entitas beroperasi.</p>	<p>Berdasarkan PSAK 52 suatu mata uang merupakan mata uang fungsional bila memenuhi indikator berikut secara agregat: sebagai arus kas indikator; indikator harga jual; dan Indikator biaya</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>
<p>10. Investasi Bersih Dalam Operasi Asing</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 21), investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri harus dicatat sebagai selisih kurs. Tetapi dalam laporan keuangan konsolidasi yang mencakup perusahaan dan kegiatan usaha luar negeri, selisih kurs awal harus diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan dipindahkan dari ekuitas ke laba atau rugi pada saat pelepasan kegiatan usaha luar negeri.</p>	<p>PSAK masih belum jelas mengenai hal ini.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>11. Penjabaran Laporan Keuangan Valuta Asing</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 21), laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aktiva dan kewajiban dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan pada tanggal pelaporan b) Jenis – jenis penghasilan dan beban dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi yang relevan, atau dengan harga rata-rata sesuai c) Perbedaan nilai tukar yang diakibatkan diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan disajikan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. d) Arus kas dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi relevan atau sesuai dengan harga rata-rata 	<p>Kebijakan Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Semua aktiva dan kewajiban dinilai dengan kurs penutupan pada akhir periode b) Seluruh pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan tengah dan kurs rata-rata tertimbang c) Akun ekuitas pemegang saham dijabarkan dengan menggunakan kurs historis d) Perbedaan nilai tukar yang diakibatkan selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas 	
<p>12. Instrumen Keuangan - Derivatif Yang Melekat</p>	<p>Berdasarkan IFRS, penilaian pemisahan derivatif melekat tidak mengecualikan USD.</p>	<p>Berdasarkan PSAK devariatif mata uang asing melekat dalam pembayaran dengan mata uang asing.</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Tabel 5.1. Perbedaan antara PSAK dan IFRS (lanjutan)

<p>13. Instrumen Keuangan – Tersedia Untuk Dijual</p>	<p>Berdasarkan IFRS (IAS 32 dan IAS 39), investasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (<i>Available for sales Financial Assets</i> (AFS)). Umumnya AFS diukur sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian dari pengukuran ulang kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan selisih kurs dan kerugian pada item keuangan, diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya tersebut direklasifikasi ke laba atau rugi saat aktiva yang bersangkutan dijual, diakui (dikumpulkan) atau dirugikan.</p>		<p>Kebijakan perusahaan: Selisih kurs dan kerugian pada item keuangan diakui dalam laporan laba rugi.</p>
<p>14. Laporan Keuangan Konsolidasi - Presentasi Non-Pengendali Bunga</p>	<p>Berdasarkan IFRS, non-pengendalian bunga disajikan sebagai bagian dari ekuitas</p>	<p>Berdasarkan PSAK Indonesia, non-pengendalian bunga dicatat dan disajikan dalam kewajiban dan ekuitas</p>	<p>Mengacu ke IFRS</p>

Berikut ini adalah uraian penjelasan dari hal – hal diatas:

1. Pengakuan Pendapatan

a) Program Loyalti Pelanggan

Program loyalitas pelanggan merupakan suatu program untuk memberikan dorongan kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa perusahaan. Jika pelanggan membeli barang ataupun jasa, entitas akan memberikan pelanggan sebuah kredit penghargaan (sering disebut poin). Pelanggan dapat menukar

kredit penghargaan seperti barang gratis atau diskon ataupun jasa. Saat ini, kebijakan akuntansi perusahaan serta PSAK tidak secara khusus membahas sosialisasi penanganan akuntansi untuk program loyalitas pelanggan.

Berdasarkan IFRS (yaitu IFRIC 13) kredit penghargaan yang diberikan di bawah program loyalitas pelanggan diakui sebagai komponen terpisah yang dapat diidentifikasi dari pendapatan dan ditangguhkan pada tanggal penjualan awal. Imbalan yang diterima atau piutang dari pelanggan dialokasikan antara item yang dijual dan kredit penghargaan berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai dimana kredit penghargaan bisa dijual secara terpisah, tetapi sebuah metode tertentu untuk alokasi ini tidak ditetapkan. IFRIC 13 tidak menjelaskan apakah jumlah yang dialokasikan untuk kredit penghargaan harus:

- i. Sama dengan nilai wajarnya / terlepas dari nilai wajar komponen lainnya (metode sisa) atau
- ii. Sebagian dari pertimbangan total berdasarkan nilai wajar penghargaan kredit relatif terhadap nilai wajar komponen lain dari penjualan (metode nilai relatif wajar)

Pendapatan yang timbul dari kredit penghargaan diakui pada saat entitas telah memenuhi kewajibannya atau jika pihak ketiga mengasumsikan kewajiban yang mendasarinya.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

b) Jasa Instalasi

Dalam hal pengakuan pendapatan untuk pendapatan instalasi, ada perbedaan antara kebijakan perusahaan yang mengadopsi Indonesia GAAP (PSAK 35 - akuntansi untuk pendapatan Jasa Telekomunikasi) dan IFRS. Berdasarkan PSAK Indonesia (PSAK 35) pendapatan dari biaya instalasi diakui sebagai pendapatan pada saat instalasi selesai. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menerapkan PSAK 35 menyatakan bahwa "pendapatan dari jasa instalasi diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan".

Berdasarkan IFRS, pendapatan dari biaya instalasi (saat instalasi tersebut sendiri tidak menciptakan substansi yang komersial) harus ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka estimasi hubungan pelanggan untuk setiap kontrak jasa. IFRS IAS 18 poin 25 menyebutkan bahwa "Sebuah biaya dimuka diakui sebagai pendapatan pada saat tidak ada ketidakpastian yang signifikan untuk pengumpulan dan entitas tidak lagi memiliki kewajiban kinerja lebih lanjut yang terkait dengan biaya. Saat jasa melalui jumlah tak terbatas bertindak berulang selama periode waktu tertentu, pendapatan diakui secara garis lurus selama jangka waktu tersebut, kecuali beberapa metode

lain yang lebih baik dalam tahap penyelesaian. Ketika tindakan tertentu jauh lebih signifikan daripada tindakan-tindakan lain, pendapatan diakui hanya setelah tindakan signifikan dilakukan. Instalasi, aktivasi dan mutasi kegiatan ini terkait dengan jasa diberikan oleh perusahaan (yaitu saluran layanan telekomunikasi tetap dan layanan data berbasis internet) yang dibayar dimuka oleh pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan masih memiliki kewajiban kinerja lebih lanjut yang terkait dengan biaya. Akibatnya, pendapatan instalasi harus ditangguhkan dan diamortisasi kemudian melalui masa hubungan pelanggan yang diharapkan.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

c) Kontrak Konstruksi

Berdasarkan PSAK Indonesia, pendapat dibawah perjanjian kontrak konstruksi, diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Proses konstruksi telah melewati tahap inisiasi, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua kriteria untuk memulai pembangunan telah terpenuhi.

- ii. Jumlah pembayaran dari pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa dikembalikan oleh pembeli.
- iii. Pendapatan dari penjualan bangunan dapat diestimasi secara andal.

Berdasarkan IFRS, Perusahaan hanya dapat menerapkan akuntansi kontrak konstruksi jika pembeli dapat menentukan elemen struktur utama dari desain dan atau perubahan struktural utama. Sesuai dengan IFRC 15, suatu entitas harus memisahkan komponen dalam transaksi (yaitu pendapatan dari jasa dan atau pendapatan dari penjualan barang). Pendapatan dari penjualan barang harus diakui oleh preferensi untuk metode persentase penyelesaian pada saat risiko dan imbalan yang ditransfer secara terus menerus, jika tidak, pendapatan diakui pada saat pembangunan selesai dan risiko telah dialihkan kepada pembeli.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

2. Perjanjian Konsesi Jasa

Adalah perjanjian antar entitas sektor swasta (operator) dengan Pemerintah (pemberi Konsesi / Grantor) untuk membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa pelayanan publik kepada masyarakat, atau meningkatkannya dan mengoperasikan serta memelihara infrastruktur tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Sampai dengan 1 Januari 2012, PSAK tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana pencatatan transaksi konsesi jasa. Pada periode tersebut, Telkom mengklasifikasikan infrastruktur yang dibangun atas perjanjian konsesi jasa ke dalam aset tetap dan didepresiasi sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Berdasarkan IFRS (IFRIC 12 – Perjanjian Konsesi Jasa) infrastruktur dari perjanjian konsesi jasa tidak diakui sebagai aset tetap, karena Telkom tidak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur tersebut. Dalam interpretasi ini Telkom mengakui dan mengukur pendapatan dari jasa yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan IAS 11 – kontrak konstruksi (untuk pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan konstruksi dan jasa *upgrade*) dan IAS 18 – pendapatan (untuk pendapatan dan biaya yang terkait dengan jasa operasi).

Perbedaan ini berpengaruh material dalam laporan keuangan.

3. Sewa

a) Amortisasi Hak Atas Tanah

Berdasarkan PSAK Indonesia (PSAK 30), hak atas tanah dicatat sebagai tanah dan tidak disusutkan, kecuali dapat diprediksi bahwa manajemen tidak akan dapat memperpanjang atau memperbaharui hak atas tanah atau perpanjangan atau pembaharuan sangat kecil.

Perubahan untuk IFRS 2009 menjadi IAS 17 menghapus pedoman yang menyatakan bahwa "sewa tanah biasanya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi, kecuali pada akhir masa sewa diperkirakan akan diberikan kepada lessee". Dalam amandemen tersebut, sewa tanah dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika secara substansial seluruh risiko dan imbalan akan ditransfer ke lessee, meskipun pada akhir masa sewa tidak akan diberikan ke lessee.

Hak untuk menggunakan tanah bagi Telkom harus dicatat sebagai sewa dan diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan tanah belum ditransfer dari lessor kepada lessee (yang ditunjukkan dengan tidak ada transfer hak kepemilikan pada akhir sewa, tidak ada opsi pembelian, dan kehidupan ekonomi jika lahan terbatas sehingga tidak dapat menentukan masa sewa sebagai

bagian utama dari kehidupan tanah ekonomi). Sebuah pembayaran yang dilakukan untuk memperoleh sewa yang dicatat sebagai sewa operasi merupakan pembayaran sewa prabayar yang diamortisasi selama masa sewa sesuai dengan pola manfaat yang diberikan.

Perbedaan ini berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

b) Pengaturan Bagi Hasil (*Revenue Sharing Arrangement (RSA)*)

Sebelum 1 Januari 2010, akun Telkom untuk aset tetap (*Property, Plant and Equipment (PP & E)*) yang dibangun oleh investor di bawah RSA sesuai dengan PSAK Nomor 35. Telkom mencatat PP & E sebagai "Aktiva Tetap dibawah RSA" saat aktiva telah selesai dan siap digunakan (dengan kredit awal sesuai dengan "Pendapatan belum diakui pada RSA") berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh investor sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak antara Perusahaan dan para investor. PP & E akan disusutkan selama taksiran masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pendapatan diterima di muka diamortisasi selama masa bagi hasil (*revenue-sharing period*) dengan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, perusahaan mencatat sahamnya dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset

tersebut selama masa bagi hasil, setelah dikurangi bagian investor. Pada akhir periode RSA, PP & E di bawah RSA akan direklasifikasi ke dalam akun "Aktiva tetap".

Efektif 1 Januari 2010, PSAK no 35 telah dicabut dan Telkom harus menjelaskan transaksi RSA sebagai sewa pembiayaan yang setara dengan akuntansi sewa sebagaimana dimaksud dalam IAS 17.

Berdasarkan IFRS, RSA dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan IAS 17, sewa, dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (berdasarkan indikator utama, misalnya *ownership* ditransfer pada akhir masa sewa, aset sewa bersifat khusus dan hanya lessee dapat menggunakannya tanpa modifikasi)

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

4. Biaya Pinjaman

Berdasarkan PSAK Indonesia, aset yang berkualitas dimana biaya bunga yang bisa dikapitalisasi harus memakan waktu minimal 12 bulan untuk untuk siap digunakan.

Berdasarkan IFRS, aset yang berkualitas membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

5. Imbalan Kerja - Keuntungan Dan Kerugian Aktuarial

Saat pertama melakukan adopsi IFRS, Telkom dapat memilih untuk:

- a. membagi keuntungan aktuarial kumulatif dan kerugian, dari dimulainya rencana tersebut sampai dengan tanggal transisi ke IFRS kedalam bagian yang diakui, atau
- b. memilih pembebasan untuk mengakui semua akumulasi keuntungan aktuarial dan kerugian pada tanggal transisi.

Telkom memilih hal yang kedua dan dianggap telah menjadi dasar untuk penyusunan laporan rekonsiliasi.

Perbedaan ini berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

6. Karyawan - Kompensasi Cuti

PSAK dan IFRS mengatur imbalan jangka panjang lainnya sebagai berikut: keuntungan karyawan dibayarkan selama mereka bekerja, selain kompensasi ekuitas lebih dari satu tahun setelah akhir periode dimana karyawan memberikan jasa biasanya diakui selama periode jasa itu diberikan. Keuntungan jangka panjang lainnya imbalan kerja dicatat dengan cara yang mirip dengan imbalan pasca kerja. Namun,

semua keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa masa lalu segera diakui dalam laporan laba rugi.

Berikut ini adalah praktek akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya: hanya PT Telekomunikasi Seluler yang mengakui layanan penghargaan jangka panjang dalam bentuk kompensasi cuti jangka panjang selama periode jasa karyawan. Entitas lain di bawah Telkom Group tidak mengakui layanan penghargaan jangka panjang seperti ini.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

7. Aset Tak Berwujud

a) Goodwill

Berdasarkan PSAK Indonesia, goodwill diamortisasi dengan metode garis lurus selama maksimum 20 tahun.

Berdasarkan IFRS (IAS 38) goodwill tidak diamortisasi dan sebagai gantinya tunduk pada penurunan pengujian setiap tanggal pelaporan. Pengecualian dalam IFRS 1 diasumsikan untuk laporan rekonsiliasi: jumlah goodwill yang tercatat pada awal laporan posisi keuangan IFRS akan menjadi nilai tercatatnya sesuai dengan SAK sebelumnya pada tanggal transisi ke IFRS.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan.

b) Masa Manfaat Tidak Terbatas

PSAK tidak mengatur mengenai konsep aktiva tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Biasanya aktiva tidak berwujud diamortisasi berdasarkan garis lurus sepanjang umur manfaatnya, dengan jangka waktu maksimum 20 tahun.

Berdasarkan IFRS (IAS 38) aktiva tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi, melainkan tergantung pada pengukuran penurunan nilai paling tidak setiap tahun.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

8. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi - Penghapusan Keuntungan Yang Belum Direalisasi

Indonesian GAAP (PSAK 15) masih belum jelas dalam hal penghapusan laba yang belum direalisasi untuk transaksi dengan perusahaan asosiasi. Berdasarkan IFRS (IAS 28) keuntungan dari transaksi dengan perusahaan asosiasi dieliminasi sampai sebatas kepemilikan investor. Kerugian dieliminasi dengan cara yang sama, kecuali untuk transaksi pelepasan aset yang ditransfer terganggu. Saldo

seperti piutang atau hutang dan deposito atau pinjaman ke atau dari perusahaan asosiasi tidak dieliminasi ketika menerapkan metode ekuitas.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

9. Fungsional Valuta Asing

Berdasarkan PSAK Indonesia (PSAK 52), suatu mata uang dikatakan sebagai mata uang fungsional apabila memenuhi indikator berikut secara agregat:

- a) Arus kas indikator; arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaan didominasi oleh mata uang tertentu.
- b) Indikator harga jual: harga jual produk perusahaan dalam waktu dekat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang tertentu atau produk perusahaan itu didominasi untuk pasar ekspor, dan
- c) Indikator biaya: biaya perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang tertentu.

Berdasarkan IFRS (IAS 21), mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang kondisi perekonomian utama dimana sebuah entitas beroperasi. Hal ini biasa digunakan, namun bukan sebuah keharusan, mata uang di mana entitas utama menimbulkan dan mengeluarkan dana tunai.

Pada adopsi IFRS pertama, adopter pertama kali dikecualikan dari transfer penyesuaian penjabaran kumulatif yang ada pada tanggal transisi ke IFRS. Jika memilih pembebasan ini, penyesuaian penjabaran kumulatif untuk semua operasi asing akan dianggap menjadi nol pada tanggal transisi ke IFRS. Pembebasan ini diasumsikan diambil ketika menyiapkan laporan rekonsiliasi.

Perbedaan ini berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

10. Investasi Bersih Dalam Operasi Asing

Berdasarkan IFRS (IAS 21), investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri harus dicatat sebagai berikut:

Selisih kurs karena penjabaran item moneter yang menjadi bagian investasi neto dalam operasi luar negeri, harus tercermin dalam laporan laba rugi tersendiri pada laporan keuangan perusahaan dan dalam laporan keuangan yang terpisah dari kegiatan usaha luar negeri. Tetapi dalam laporan keuangan konsolidasi yang mencakup perusahaan dan kegiatan usaha luar negeri, selisih kurs awal harus diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan dipindahkan dari ekuitas ke laba atau rugi pada saat pelepasan kegiatan usaha luar negeri.

PSAK masih belum jelas mengenai hal ini. Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

11. Penjabaran Laporan Keuangan Valuta Asing

Dalam praktek akuntansi yang berlaku, Telkom mengambil pendekatan berikut dalam menerjemahkan mata uang asing laporan keuangan:

- a) Semua aktiva dan kewajiban diterjemahkan dengan menggunakan kurs penutupan yang dikutip oleh *Reuters* pada akhir periode pelaporan (membeli bunga untuk aktiva dan menjual bunga untuk kewajiban)
- b) Seluruh pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan tengah (pada akhir periode pelaporan) di Tellin dan kurs rata-rata tertimbang di Sigma AIT dan CSM, masing-masing, seperti dikutip Reuters.
- c) Akun ekuitas pemegang saham dijabarkan dengan menggunakan kurs historis.
- d) Perbedaan nilai tukar yang diakibatkan (selisih kurs) diakui sebagai bagian dari ekuitas

Berdasarkan IFRS (IAS 21), laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan sebagai berikut:

- Aktiva dan kewajiban dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan pada tanggal pelaporan

- Jenis – jenis penghasilan dan beban dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi yang relevan, atau dengan harga rata-rata sesuai
- Perbedaan nilai tukar yang diakibatkan diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan disajikan sebagai komponen terpisah dari ekuitas, sering disebut sebagai cadangan kurs, yang merupakan elemen dari pendapatan komprehensif lainnya
- Arus kas dijabarkan dengan kurs pada saat transaksi relevan atau sesuai dengan harga rata-rata

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

12. Instrumen Keuangan - Derivatif Yang Melekat

Dalam praktek saat ini (sesuai dengan ISAK 6), derivatif mata uang asing melekat dalam pembayaran dalam mata uang asing dipertimbangan berkaitan erat dengan instrumen utama dan tidak memerlukan pemisahan dari kontrak utama jika mata uang asing umumnya digunakan dalam transaksi bisnis local (misalnya USD). Berdasarkan IFRS, penilaian pemisahan derivatif melekat tidak mengecualikan USD.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

13. Instrumen Keuangan – Tersedia Untuk Dijual

Berdasarkan kebijakan akuntansi saat ini, instrumen hutang dan reksa dana dicatat sebesar nilai wajar dan disajikan sebagai investasi sementara (aktiva lancar). Selanjutnya perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya tersebut direklasifikasi ke laba atau rugi ketika investasi terkait dijual.

Selisih kurs dan kerugian pada item keuangan diakui dalam laporan laba rugi. Penyertaan bursa saham dengan kepemilikan di bawah 20% dicatat sebagai biaya sebesar nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal dan disajikan sebagai investasi jangka panjang (aktiva tidak lancar).

Berdasarkan IFRS (IAS 32 dan IAS 39), investasi di atas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (*Available for sales Financial Assets* (AFS)). Umumnya AFS diukur sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian dari pengukuran ulang kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan selisih kurs dan kerugian pada item keuangan, diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya tersebut direklasifikasi ke laba atau rugi saat aktiva yang bersangkutan dijual, diakui (dikumpulkan) atau dirugikan.

Investasi di instrumen hutang diklasifikasikan sebagai AFS yang diperkirakan akan direalisasi atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Semua investasi AFS lainnya diklasifikasikan sebagai aset lancar.

AFS investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga pasar yang berlaku di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal berdasarkan biaya perolehan. Nilai wajar dari investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga pasar di pasar aktif diukur secara andal apabila :

- variabilitas dalam kisaran yang wajar perkiraan nilai wajarnya tidak signifikan untuk instrument tersebut, atau
- probabilitas dari berbagai perkiraan dalam jangkauan dapat dinilai cukup dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

14. Laporan Keuangan Konsolidasi - Presentasi Non-Pengendali Bunga

Berdasarkan PSAK Indonesia, non-pengendalian bunga dicatat dan disajikan dalam kewajiban dan ekuitas. Berdasarkan IFRS, non-pengendalian bunga disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Perbedaan ini tidak berpengaruh secara material dalam laporan keuangan

Dari transaksi – transaksi diatas, terdapat tiga transaksi yang dianggap material terhadap laporan keuangan Telkom tahun 2011. Ketiga transaksi tersebut adalah:

1. Perjanjian Konsesi Jasa

Sebelumnya Telkom mengklasifikasikan infrastruktur yang dibangun atas perjanjian konsesi jasa ke dalam aset tetap dan didepresiasi sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Berdasarkan IFRS (IFRIC 12 – Perjanjian Konsesi Jasa) infrastruktur dari perjanjian konsesi jasa tidak diakui sebagai aset tetap, karena Telkom tidak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur tersebut. Dalam interpretasi ini Telkom mengakui dan mengukur pendapatan dari jasa yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan IAS 11 – kontrak konstruksi (untuk pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan konstruksi dan jasa *upgrade*) dan IAS 18 – pendapatan (untuk pendapatan dan biaya yang terkait dengan jasa operasi).

2. Pengecualian IFRS 1

a. Imbalan karyawan

Saat adopsi IFRS untuk pertama kalinya, Telkom Group memilih untuk mengakui sekaligus semua akumulasi laba rugi aktuarial dari semua program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca kerja imbalan pasti lainnya dari lingkungan Telkom Group

pada tanggal transisi dengan mencatatnya pada saldo awal laba ditahan. Sehingga nilai laba.rugi aktuarial yang belum diakui pada tanggal transisi menjadi nihil.

b. Penyesuaian translasi kumulatif

IFRS 1 membebaskan *adopter* pertama kali untuk meneruskan jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang ada (atau telah tercatat sebelumnya) pada saat tanggal transisi. Dalam hal ini, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri akan dianggap nol pada saat tanggal transisi.

Sebagai akibat dari pembebasan ini, keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri yang diakui setelah tanggal transisi harus meniadakan jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang tercatat sebelum tanggal transisi dan hanya memperhitungkan selisih nilai tukar setelahnya.

Telkom group, sebagai *adopter* pertama kali memilih pembebasan ini karena tidak memiliki perincian atas jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri, misalnya perincian untuk setiap anak perusahaan atau asosiasi. Jadi telkom group tidak dapat mengelompokan ulang ke laba atau rugi ketika terjadi pelepasan salah satu dari kegiatan usaha luar negeri yang terkait.

3. Hak atas tanah

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Amortisasi hak atas tanah dihitung selama masa sewa. Dan Telkom telah mengakui beban amortisasi hak atas tanah untuk tahun yang berakhir 31 desember 2011.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh adopsi IFRS bagi perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah Telkom menjadi *leader* dan contoh bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam implementasi IFRS. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang lebih *valuable*, Investor dan *stockholder* lebih percaya pada laporan keuangan Telkom, kinerja perusahaan dinilai lebih baik, sistem informasi dan teknologi perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan IFRS.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam mengadopsi IFRS adalah *knowledge*, risiko yang besar, dan sistem IT yang kurang mendukung.
3. Terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan IFRS dengan laporan keuangan PSAK. Perbedaan yang material disebabkan oleh empat hal, yakni: pencatatan perjanjian konsesi jasa, pencatatan imbalan karyawan, penyesuaian terhadap transaksi komulatif, dan pencatatan atas

hak atas tanah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh salah satu dari kondisi ini; yang pertama standar IFRS berbeda dengan PSAK, yang kedua dalam beberapa hal standar PSAK belum jelas atau belum mengatur hal tersebut, dan yang ketiga kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dengan standar IFRS maupun PSAK.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian adalah waktu penelitian di lokasi yang singkat dan kurangnya referensi buku-buku atau pun jurnal ilmiah yang berkaitan tentang PSAK yang terbaru maupun tentang implementasi IFRS. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk baru melakukan *full adopt* IFRS pada tahun 2011, dan penelitian ini dilakukan di awal tahun 2012, sehingga belum didapatkan pengaruh secara tidak langsung penerapan IFRS terhadap bisnis perusahaan.

C. Saran

Dari keterbatasan penelitian tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan untuk:

1. Kepada pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap dampak secara tidak langsung penerapan IFRS bagi bisnis perusahaan. Misalnya meneliti pengaruh IFRS terhadap investasi perusahaan.

2. Kepada perusahaan yang *go public* untuk menerapkan IFRS dalam bisnisnya, agar dapat membuka peluang untuk terjun dalam dunia bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredson, Keith, et al. 2007. *Applying International Financial Reporting Standards enhanced edition*. John Wiley & Sons Australia, Ltd, Australia.
- Alfredson, Keith, et al. 2009. *Applying International Financial Reporting Standards 2nd edition*. John Wiley & Sons Australia, Ltd, Australia .
- Epstein, Barry J. 2008. *IFRS 2008 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*. John Wiley & Sons, Inc, United State of America.
- Forgeas, Remi. 2012. “Is IFRS That Different From U.S. GAAP?”. *AICPA IFRS Resources*. <http://www.ifrs.com/overview/General/differences.html>. Diakses tanggal 20 Juli 2012
- Gamayuni, Rindu Rika. 2009. “Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menuju International Financial Report Standarts (IFRS)”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 14. No.2 Juli 2009
- IAI. 2008. Standar Akuntansi SAK umum PSAK 52 Mata Uang Pelaporan. http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20Uum&iid=55 Diakses tanggal 1agustus 2012.
- IAI. 2011. Indonesia Siap Terapkan IFRS. Akuntan Indonesia. Edisi 01 Juli 2011
- IAI. 2011. Saatnya Asia Berperan Besar dalam Penyusunan Standar Akuntansi Dunia. Akuntan Indonesia. Edisi 01 Juli 2011.
- IAI. 2012. “SAK Efektif Berlaku”. http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/index.php?id=97 . Diakses tanggal 30 Juli 2012
- IAI. 2012. Tantangan Implementasi IFRS 2012. Akuntan Indonesia. Edisi 01 Juli 2011
- IASB. 2009 . “IAS 11 Construction Contract”.
<http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C5EFBA7A-0A61-44F1-85E1-E3D681F0CF9E/0/IAS11.pdf> . Diakses tanggal 18 Juli 2012
- IASB <http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/BC2EBD78-5D97-4B72-8BFD-B08E9131A59A/0/IFRS1.pdf> diakses tanggal 18 Juli 2012

- International Accounting Standard Board. 2011. *International Financial Reporting Standards ; Part A The Conceptual Framework and Requirements*. International Accounting Standard Board, United Kingdom.
- Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. BPF, Yogyakarta.
- K. Yin, Robert. 2009. *Studi Kasus Desain & Metode*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nandakumar, A, Kalpesh J. Mehta, Dr. T.P. Ghosh, Dr. Yass A Alkafaji. 2012. *Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional*. PT Indeks, Jakarta
- Pricewaterhouse Coopers Indonesia. 2010. “US GAAP, IFRS and Indonesian GAAP similarities and differences”.
http://www.pwc.com/en_ID/id/publications/assets/IFRS-GAAP-comparison.pdf
Diakses tanggal 2 juni 2012
- Rachmanto, Chairudin Nur. 2010. “PSAK 47 Akuntansi Tanah (Accounting for Land)”.
<http://slidepajak.wordpress.com/2010/04/07/psak-47-akuntansi-tanah-accounting-for-land/> . diakses tanggal 2 Agustus 2012
- Sadjiarto, Arja, 1999, Akuntansi Internasional: Standarisasi Versus Harmonisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1 (2): 144-161.
- Taylor, Dennis W. *Costs-benefits of adoption of IFRSs in countries with different harmonization histories*. Universitas RMIT, Melbourne Australia .
- Weygandt, Jerry, et al. 2011. *Financial Accounting IFRS edition*. John Wiley & Sons, Inc, United States of America.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan periode pelaporan perusahaan Anda berlangsung ? Januari – Desember ? atau bulan lain ?
2. Siapakah yang membuat laporan keuangan perusahaan Anda ? Pihak internal atautkah pihak eksternal ?
3. Apakah perusahaan Anda sudah mulai menerapkan IFRS dalam laporan keuangan? sejak kapan?
4. IFRS apa saja yang sudah diterapkan di perusahaan ini?
5. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan IFRS di perusahaan Anda ?
6. Apakah sumber daya perusahaan telah siap untuk menerima perubahan itu ?
7. Apa saja kendala awal ketika menerapkan IFRS dalam laporan keuangan perusahaan?
8. Bagaimana cara perusahaan mengatasi kendala tersebut?
9. Pada laporan keuangan yang belum menggunakan IFRS dan setelah menggunakan IFRS apakah terdapat perbedaan angka pada item yang sama?
10. Apakah terdapat akun – akun baru yang muncul setelah penerapan IFRS ini ? Apa saja ?
11. Seberapa jauh perubahan tersebut mempengaruhi laporan perusahaan?
12. Setelah menerapkan IFRS, adakah keuntungan yang telah dirasakan oleh perusahaan? Apa saja ?
13. Apakah ada perbedaan antara IFRS yang sudah diterapkan dengan PSAK terbaru, hasil konvergensi dengan IFRS?
14. Ekspektasi apa yang perusahaan Anda harapkan dari adopsi IFRS pada laporan keuangan ?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Narasumber : Bapak Agus Heri P. Ketua gugus tugas IFRS Telkom group

Wawancara dilakukan di kantor Telkom pusat, sub bidang gugus tugas IFRS lantai III, Bandung Jawa Barat. Wawancara dilakukan tanggal 20 Mei 2012.

P* : Siapakah yang membuat laporan keuangan perusahaan?

J* : yang membuat laporan keuangan adalah pihak internal. Divisi laporan keuangan yang membuatnya. Kemudian laporan tersebut diaudit oleh pihak eksternal.

P : apakah penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar PSAK ?

J : jadi selain di BEI, Telkom group juga terdaftar di New York Stock exchange, London stock exchange juga. Untuk yang di Indonesia laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK, oleh karena itu laporan yang sudah diaudit diserahkan ke BAPEPAM. Untuk New York stock exchange kita menggunakan US GAAP. Namun untuk saat ini sudah beralih ke IFRS.

P : kalau begitu Telkom sudah menggunakan IFRS?

J : Iya

P : Sejak kapan Telkom menerapkan IFRS ?

J : Untuk laporan keuangan full IFRS sudah mulai kami terapkan pada laporan keuangan tahun 2011 yang diserahkan ke NYSE. Untuk persiapannya kurang lebih mulai tahun 2008 sampai 2010.

P : sampai saat ini IFRS apa saja yang sudah diterapkan diperusahaan ini?

J : sudah semuanya kami terapkan

P : lalu apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan IFRS?

J : untuk menerapkan IFRS direktur keuangan telah mengeluarkan pedoman akuntansi berdasarkan IFRS. Dan pedoman ini sudah disetujui oleh BAPEPAM. Pedoman ini juga bisa dijadikan bukti. Nanti kalau ada yang bertanya Telkom sudah menggunakan IFRS, buktinya apa. Nah ini buktinya buku pedoman akuntansi perusahaan yang sudah berdasarkan IFRS.

P : Apakah setelah menerapkan IFRS terdapat akun yang berbeda dilaporan keuangan?

J : Tidak ada..

P : Sebelum mengacu ke IFRS, standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan mengacu kemana?

J : untuk laporan yang diserahkan ke BAPEPAM tentu saja mengacu ke PSAK. Laporan keuangan yang diserahkan ke NYSE dulunya mengacu kepada US GAAP. Sekarang ini pihak NYSE sudah menganjurkan untuk menggunakan IFRS. Kalau belum menggunakan IFRS masih menggunakan US GAAP harus membuat rekonsiliasi. Oleh karena itu Telkom memilih untuk langsung menggunakan IFRS.

Mengapa Telkom memilih IFRS? Nah point of view hukum IFRS dimunculkan dari CSA. CSA itu semacam DSAK-nya Amerika. CSA itu merupakan wakil dari investor yang tahu persis dari regulasi keuangan. IFRS itu kan salah satunya ingin menstandarkan seluruh laporan keuangan global menjadi sama. Paling tidak koridornya sama, interpretasinya sama, jadi investornya semakin percaya. Dengan demikian -kan ukuran kinerja perusahaan menjadi sama.

Investor Amerika itu lebih percaya ke perusahaan yang mengimplementasi IFRS. Kira – kira tingkat confidential diatas 90% pada perusahaan yang telah menggunakan IFRS. Selain itu IFRS juga bisa mempersempit ruang gerak fraud.

P : Adakah alasan khusus mengapa Telkom mengimplementasi IFRS? Selain dari tuntutan pasar global?

J : Bagi Telkom learning process itu penting. Jadi kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Di Amerika untuk perusahaan yang menggunakan IFRS tak diharuskan melakukan rekonsiliasi dengan US GAAP. Dengan demikian perusahaan akan bisa mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan rekonsiliasi. Lagipula IFRS diambil mayoritas US GAAP. Sehingga andai tidak menggunakan IFRS nanti kerjanya menjadi double. Akan sangat tidak efektif.

Seluruh perusahaan yang mengimplementasi IFRS harus punya kebijakan akuntansi berdasarkan IFRS. Telkom juga sudah punya. Dengan implementasi IFRS Telkom menjadi no satu. Karena merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menerapkan full IFRS.

P : Lalu apa saja yang dilakukan perusahaan untuk mendukung impementasi IFRS?

J : IFRS kan merupakan ilmu baru. Untuk memenuhi tuntutan itu beberapa karyawan dikirim untuk belajar IFRS. Bahkan samapai diploma IFRS. Lalu untuk mendukung implementas IFRS juga dibuat gugus tgas IFRS ini. Dalam gugus tugas IFRS secara khusus dilakukan pelatihan IFRS, seminar IFRS, perusahaan juga dilibatkan dalam proses konversi IFRS yang dilakukan oleh DSAK, ada juga pelatihan di luar negeri. Dari tingkat direktur sampai dengan

karyawan operasional semua dilibatkan. Sasaran yang ingin dituju dengan implementasi ini adalah quality dan transparasi

P : Kalau begtu kira – kira sudah ada berapa orang yang benar – benar paham IFRS Pak?

J : Dari bagian keuangan kurang lebih 60 orang yang sudah mengerti IFRS. Ini merupakan salah satu keuntungan. Keuntungan lain bagi anak perusahaan yang juga telah menggunakan IFRS adalah mempermudah akses masuk ke pasar global.

P : Apakah bapak mempunyai saran bagi perusahaan – perusahaan terkait dengan IFRS ini?

J : Yaa untuk saran untuk perusahaan yang sudah go public sesegera mungkin menerapkan IFRS. Karena banyak sekali keuntungannya. Untuk perusahaan yang tidak go public bisa belajar ke perusahaan yang sudah menerapkan IFRS. Kalau seandainya butuh bantuan, Telkom bisa membantu.

2. Narasumber: Bapak Alam, karyawan divisi gugus tugas IFRS

P : Apakah ada perbedaan antara laporan keuangan versi IFRS dengan versi PSAK?

J : tentu saja ada. Dari teknik penyajian saja sudah berbeda. Tapi sekarang PSAK juga sudah sebagian besar mengadopsi IFRS.

P : Apakah ada pengaruh implementasi IFRS ini ke perusahaan?

J : misalnya dibidang apa?

P : Dibidang IT ?

J : Kalau dibidang IT ada. Dulu sistem akuntansi untuk PSAK itu menggunakan SAP. Kalau sekarang sudah beralih menjadi ERP yang sesuai dengan kebutuhan IFRS.

P : apakah ada pengaruh dibidang struktur organisasi perusahaan ?

J : kalau secara garis besar tidak ada perubahan. Hanya saja di bidang keuangan ditambah satu divisi lagi yakni gugus tugas IFRS. Yang khusus dibuat untuk mengkaji IFRS bagi perusahaan

P : kalau begitu apa saja tugas gugus tugas IFRS?

J : gugus tugas IFRS sebenarnya merupakan suatu subdivisi dari bagian keuangan yang secara khusus membahas mengenai IFRS. Tugasnya tu yang pertama mempersiapkan data – data terkait dengan IFRS, yang kedua melakukan perencanaan. Langkah – langkah yang akan ditepuh, sasaran yang ingin dituju. Lalu yang ketiga melakukan assessment, dari hasil assessment tersebut lalu merancang atau mendesain suatu sistem yang baru, sistem ini dievaluasi kalau sudah bagus lalu diimplementasi ke perusahaan.

3. Narasumber : Bapak Agus Heri (Wawancara kedua)

P : Apa saja tugas Gugus Tugas IFRS?

J : gugus tugas untuk mengimplementasikan: mempersiapkan, merencanakan, melakukan assessment, mendesain sistem, mengimplementasikan

P : Kendala apa saja yang dialami perusahaan saat menggunakan IFRS?

J : kendala yang utama adalah knowledge . dimana pengetahuan IFRS terutama di Indonesia masih minim. Inikan masih termasuk dalam ilmu baru. Bicara mengenai kendala, sebenarnya kita bicara tentang manajemen risiko. Jadi kita harus mengetahui resiko – resiko yang mungkin akan terjadi lalu kita berusaha mencari solusi atau paling tidak cara untuk menghindarinya

Kendala yang pertama adalah knowledge. Untuk itu SDM diperkuat dengan training – training, diikut sertakan dalam seminar dan lain – lain.

Yang kedua adalah ini adalah new standard, dan Telkom sebagai perusahaan yang cukup ternama tidak boleh gagal dalam menerapkan standar ini. Untuk memperkecil risiko lalu apa yang dapat kita lakukan? Lalu kita mengajak konsultan. Tentu saja yang sudah qualified. Bersama dengan konsultan kita merencanakan langkah – langkah yang akan diambil. Langkah – langkah ini dilakukan secara kontinyu, oleh sebab itu perlu pengawasan. Untuk memonitor secara periodic maka dibentuklah PMO, Project Manager Operational. Ketua PMO ya saya sendiri (bapak Agus Heri,red)

Kendala selanjutnya adalah di sistemnya. Awalnya sistem yang digunakan adalah SAP. Namun laporan keuangan yang dihasilkan hanya berdasarkan PSAK saja. Setelah kami menghubungi pihak SAP, ternyata sistem bisa diubah agar dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS. Lalu sistemnya sekarang menggunakan ERP. Saat ini kami juga sedang

mengembangkan sistem yang bukan hanya bisa menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS, namun juga berdasarkan peraturan pajak.

Kami juga sedang mengembangkan ARD, yakni Auto Reporting Desolation. Selama ini template laporan keuangan cenderung dari tahun ke tahun ada beberapa persamaan dan sedikit perbedaan. Sistem ini nantinya akan menghasilkan template yang sama, sehingga tidak repot untuk membuat laporan keuangan.

P : Tadi disebutkan bahwa untuk memperkecil risiko maka di bentuk PMO yang bekerjasama dengan konsultan. Apa saja tugas dari PMO ini?

J : PMO ini adalah bagian dari gugus tugas IFRS. Langkah – langkah yang dilakukan PMO bersama dengan konsultan tersebut adalah :

1. *Preparation* saat tim kerja mempersiapkan semua data yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan terkait dengan IFRS ini.
2. *Planning* Setelah semua data diperoleh, maka mulai direncanakan pengujian serta perkiraan kemungkinan semua jawaban atas pengujian tersebut.
3. Melakukan *assessment* atau pengujian. *Assessment* dilakukan untuk mendapatkan kondisi - kondisi yang berbeda antara kondisi perusahaan dengan IFRS. Sehingga perubahan yang nantinya akan dilakukan tepat sasaran.
4. Mendesain sistem. Hasil dari *assessment* akan ditidakanjuti dengan membuat sebuah sistem yang sesuai dengan IFRS.

5. Mengimplementasikan. Implementasi merupakan tahap terakhir. Dari semua hasil penelitian yang dilakukan dan menghasilkan sebuah sistem, kemudian sistem ini diimplementasikan pada perusahaan. Pada saat implementasi pun tetap dilakukan evaluasi untuk mencegah risiko – risiko yang mungkin terjadi.

P : antara PSAK dengan IFRS apakah terdapat perbedaan?

J : Perbedaan apa yang dimaksud? Saya rasa tidak ada banyak perbedaan. Apalagi saat ini Indonesian GAAP (PSAK,red) telah banyak mengadopsi IFRS. Sebenarnya kalau kita membandingkan antara IFRS dengan PSAK, jangan semata – mata membandingkan, ini beda dengan ini, oh yang ini sama, bukan. Tapi kita mencari praktek – prakteknya. Sebenarnya secara standar terdapat gap difference antara IFRS dengan PSAK, tetapi kalau ditinjau dari segi transaksi keduanya tidak memiliki perbedaan.

Yang pertama adalah kondisi ideal. Dimana PSAK dan IFRS tu sama, baik secara standar maupun transaksi. Yang kedua secara standar PSAK berbeda dengan IFRS, namun secara transaksi sama. Kondisi yang ketiga PSAK dan IFRS sama dalam segi standarnya, namun jika dilihat lagi ternyata prakteknya PSAK masih perlu diperbaiki yang terakhir adalah antara PSAK dan IFRS berbeda, namun implementasinya sama. Nah karena perbedaan – perbedaan inilah ada istilah no transaction dan reconciliation.

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI

Nomor : 31/Kaprodi Akt./1052/III/2012

21 Maret 2012

Lamp : -----

Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Jl. Japati No.1 Bandung Jawa Barat 40133

Dengan Hormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Crecentia Yudhita Wijayanti.
NIM : 082114077
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII

Akan melaksanakan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kantor Pusat - Bagian Keuangan
Jl. Japati No.1 Bandung Jawa Barat 40133

Waktu : April 2012 - Mei 2012

Judul Penelitian : Evaluasi Penerapan PSAK Hasil Konvergensi IFRS. Studi Banding
pada PT. Telokomunkasi Indonesia Tbk

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengijinkan mahasiswa di atas untuk melakukan penelitian di Perusahaan yang Bapak /Ibu Pimpin.

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.

Nota Dinas

Nomor : C.Tel. 18/PD 520/COP-A0015000/2012
Kepada : Sdr. AVP NEWS DAN INFORMATION MANAGEMENT
Dari : KEPALA GUGUS TUGAS IFRS
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas Permohonan Penelitian

1. Menunjuk Nota Dinas Saudara AVP News & Information Management Nomor C.Tel.238/PD 520/COM-21/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Permohonan Penelitian, di mana terdapat pengajuan permohonan penelitian/pengumpulan data dari Crecentia Yudhita Wijayanti, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dengan surat pengantar nomor 31/Kaprodi/Akt/1052/III/2012.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami menyetujui dilakukannya penelitian/pengumpulan data tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
Waktu : 21-25 Mei 2012
Lokasi : Gugus Tugas IFRS – Financial and Logistic Policy (FLP)
GKP PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. – Lantai 3
Jl. Japati No.1 Bandung, Jawa Barat – 40133
3. Mohon informasi tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampakan ucapan terima kasih.

Bandung, 11 Mei 2012

Agus Hery Prasetyo
NIK: 600301

Tembusan
-

printed by: Agus Hery Prasetyo/600301/Telkom

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

ID : EAAF22D36150C0EF472579FB00376F3C